

**ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN  
DAN PENDAPATAN TERHADAP ALOKASI BELANJA  
MODAL DI PROVINSI JAWA TIMUR**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Ekonomi Syari'ah



Oleh :

**Hikmah Dewi Budiana**  
**NIM. E20162060**

Dosen Pembimbing :

**Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I**  
**NIP. 198209222009012005**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
2021**

**ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN  
DAN PENDAPATAN TERHADAP ALOKASI BELANJA  
MODAL DI PROVINSI JAWA TIMUR**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Ekonomi Syari'ah

Oleh :

Hikmah Dewi Budiana  
NIM. E20162060

Disetujui Pembimbing



Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I  
NIP. 198209222009012005

**IAIN JEMBER**

**ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN  
DAN PENDAPATAN TERHADAP ALOKASI BELANJA  
MODAL DI PROVINSI JAWA TIMUR**

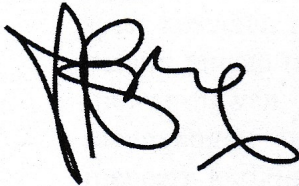
**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Ekonomi Islam  
Program Studi Ekonomi Syari'ah

Hari: Kamis  
Tanggal: 08 Juli 2021

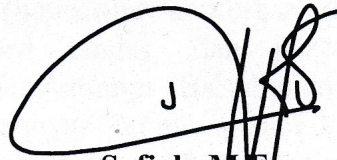
Tim Penguji

Ketua



Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M  
NIP. 196905231998032001

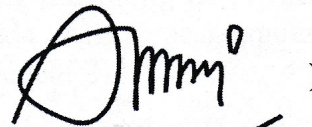
Sekretaris



Sofiah, M.E.  
NIP.199105152019032005

Anggota:

1. Dr. Abdul Rokhim, S. Ag., M.E.I (



2. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I (



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si  
NIP.19680807 200003 1 001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا  
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا  
تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا  
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2).<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Semarang: Cv. Asy Syifa') 85.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dengan segala kekurangan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Orang tua saya, Ayah tercinta Alm. Mutik Budiarto, Mama tercinta Muawanah Ningsiowati dan Ayah tiri saya Drs. Bambang Pujianto terimakasih yang tak terhingga untuk kalian atas segala dukungan berupa semangat dan materi.
2. Suamiku yang tercinta Rizki Wahyudi dan Anakku yang tersayang Ayesa Najwa Rizkiya, terima kasih atas segala dukungan serta doa, yang selama ini telah membantu menyelesaikan Skripsi ini.
3. Kakak Iparku Intan Raudatul dan Evi Candra Wahyuni yang selalu memberi semangat dan mebantu penulisan hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman yang telah membantu dan menyemangatiku, Dewi Azah, Qori Stevani Oki, Elis Amalia, dan teman-teman yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih atas segala dukungannya.
5. Almamaterku tercinta IAIN Jember, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah menjadi wadah untuk menuntut ilmu selama ini.
6. Seluruh Teman-teman seperjuangan terutama kelas Ekonomi Syariah 2 angkatan2016, terima kasih atas sejuta motivasi yang tak kunjung habis dan sejuta kenangan yang takkan terhapus oleh waktu.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang tak pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul **“ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN PENDAPATAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DI PROVINSI JAWA TIMUR”**, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, M.M. selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.
3. Ibu Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I. selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Jember sekaligus Dosen Pembimbing skripsi, yang selalu memberikan arahan dan bimbingan serta meluangkan waktunya demi kelancaran skripsi ini.

4. Bapak Ahmadiono, S.Ag, M.E.I selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan dan arahan selama pergantian semester.
5. Segenap Dosen dan Staf IAIN Jember khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Semua pihak yang terlibat dan telah berjasa dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Jember, 05 Juli 2021

Penulis

**Hikmah Dewi Budiana**  
**E20162060**

IAIN JEMBER

## ABSTRAK

**Hikmah Dewi Budiana, Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I, 2021 : *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan dan Pendapatan Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur.***

Suatu daerah memiliki kemampuan dan proporsi berbeda-beda dalam mengalokasikan struktur APBD nya tergantung potensi dan kebutuhan daerah tersebut. Sehingga hal ini dapat memunculkan kesenjangan fiskal antar daerah dan DAU ini digunakan untuk meminimalisir adanya kesenjangan tersebut. Salah satu wilayah yang memiliki proporsi belanja yang besar dalam struktur APBD adalah Jawa Timur. Aspek pengeluaran yang masih belum dapat mengelola biayanya dengan baik karena sebagian besar dananya digunakan untuk belanja barang dan jasa yang tidak bersifat produktif.

Rumusan Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1. Apakah PAD berpengaruh signifikan pada Alokasi Belanja Modal pada Struktur APBD di Jawa Timur ? dan 2. Apakah DAU berpengaruh signifikan pada Alokasi Belanja Modal pada Struktur APBD di Jawa Timur?

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Alokasi Belanja Modal pada Struktur APBD di Jawa Timur.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Populasi dan sampel nya menggunakan data panel yang merupakan gabungan dari data runtun waktu (*time series*) dan *cross section*. Data time series yang digunakan dalam penelitian ini pada tahun 2015 sampai 2019. Sementara, data cross section yang digunakan peneliti ini adalah 38 Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Total jumlah observasi data panel yang digunakan adalah 190 Observasi. Selanjutnya, instrumen pengumpulan data yang di gunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk). Data dalam laporan tahunan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) dikases resmi di website <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>. Dan yang terakhir Analisis data nya menggunakan metode *Panel Least Square* (PLS).

Berdasarkan dari hasil analisis, penelitian ini menemukan hasil terkait dengan pengaruh kinerja keuangan dan komponen APBD terhadap belanja modal di seluruh wilayah kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur. Hasil tersebut sebagai berikut:

1. PAD menunjukkan hasil positif signifikan dalam memengaruhi belanja modal di provinsi Jawa Timur.
2. DAU menunjukkan hasil negatif signifikan dalam memengaruhi belanja modal di provinsi Jawa Timur.

**Kata Kunci : Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU)**



## ABSTRACT

**Hikmah Dewi Budiana, Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I, 2021: *The Analysis of Financial Performance and Income Effect on Capital Expenditure Allocation in East Java.***

A region has different capabilities and proportions in allocating its APBD structure depending on the potential and need of the region. Therefore, it can lead to fiscal gaps between regions and DAU is used to minimize these gaps. One of provinces in Indonesia that has a large proportion of spending in the APBD is East Java. The expenditure aspect is still unable to manage its costs properly because most of the funds are used for non-productive goods and services.

The formulation of the problem studied in this thesis are: 1. Does PAD have a significant effect on Capital Expenditure Allocation on the structure of APBD in East Java? and 2. Does DAU have a significant effect on Capital Expenditure Allocation on the structure of APBD in East Java?

The purpose of this study is to examine and analyze the effect of Regional Income (PAD) and General Allocation Funds (DAU) on Capital Expenditure Allocation on the structure of APBD in East Java.

This research method uses quantitative research. The population and sample use panel data which are combinations of time series and cross section data. The time series data used in this study were from 2015 to 2019. Meanwhile, the cross section data used by this researcher are 38 regencies and cities in East Java. The total number of panel data observations used is 190 observations. Furthermore, the data collection instrument used is secondary data obtained from the annual report of the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK). It can be accessed on the official website <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>. finally, the data analysis uses the Panel Least Square (PLS) method.

Based on the results of the analysis, this study found the results related to the effect of financial performance and APBD components on capital expenditures in all districts/cities in East Java. The results are as follows:

1. PAD shows significant positive results in influencing capital expenditure in East Java.
2. DAU shows significant negative results in influencing capital expenditure in East Java.

**Keywords:** The Effect of Regional Revenue (PAD) and General Allocation Funds (DAU)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	14
a. Variabel Penelitian .....	14
b. Indikator Variabel .....	14
F. Definisi Operasional.....	21
G. Asumsi Penelitian.....	22
H. Hipotesis.....	24

I. Metode Penelitian.....	28
a. Pendekatan Dan Jenis Penelitian .....	28
b. Populasi Dan Sample .....	28
c. Teknik Dan Instrumen Pengumpulan Data .....	30
d. Analisis Data .....	30
J. Sistematika Pembahasan .....	31
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>33</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	33
B. Kajian Teori.....	45
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	45
b. Dana Alokasi Umum (DAU).....	46
c. Belanja Modal .....	48
<b>BAB III PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	51
B. Analisis dan Pengujian Hipotesis.....	55
C. Pembahasan .....	66
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran 1. Tabel Hasil Uji Statistik Deskriptif

Lampiran 2. Tabel Hasil Uji Normalitas

- Lampiran 3. Tabel Hasil Uji Multikolinieritas
- Lampiran 4. Tabel Hasil Uji Heterokedastisitas
- Lampiran 5. Tabel Hasil Uji Autokorelasi
- Lampiran 6. Tabel Hasil Uji Pemilihan Model Data Panel
- Lampiran 7. Tabel Hasil Analisis Fixed Effect Model (FEM)
- Lampiran 8. Tabel Hasil Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)
- Lampiran 9. Tabel Hasil uji t-statistik
- Lampiran 10. Tabel Hasil Uji F-Statistik
- Lampiran 11. Matrik Penelitian
- Lampiran 12. Surat Penelitian
- Lampiran 13. Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 14. Jurnal Kegiatan Penelitian
- Lampiran 15. Pernyataan Keaslian Tulisan
- Lampiran 16. Biodata Penulis

**IAIN JEMBER**

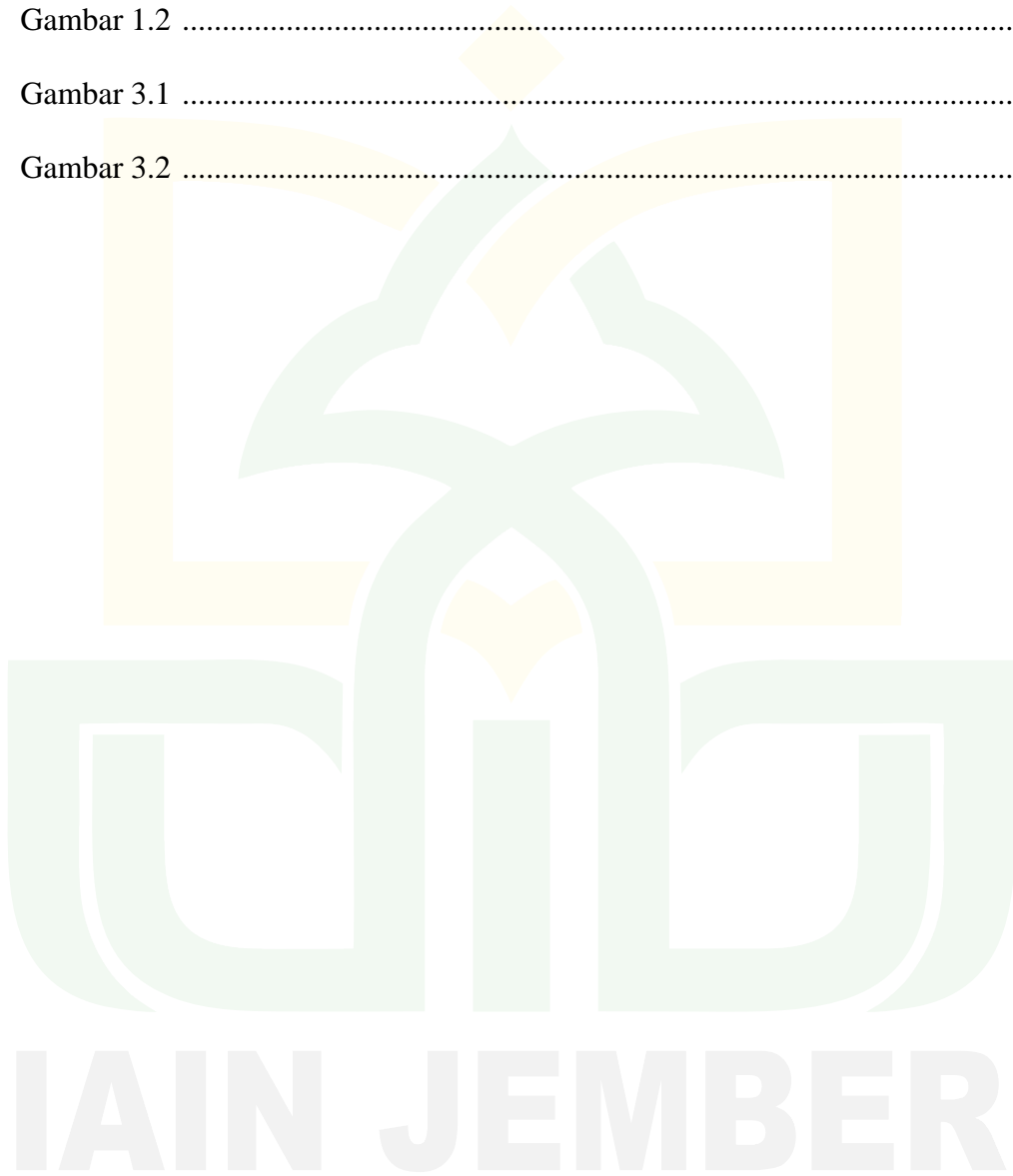
## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 .....	29
Tabel 3.2.1 .....	55
Tabel 3.2.2 .....	57
Tabel 3.2.3 .....	58
Tabel 3.2.4 .....	59
Tabel 3.2.5 .....	60
Tabel 3.3 .....	61
Tabel 3.4 .....	62
Tabel 3.5 .....	63
Tabel 3.6 .....	64
Tabel 3.7 .....	66

**IAIN JEMBER**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 .....	10
Gambar 1.2 .....	24
Gambar 3.1 .....	52
Gambar 3.2 .....	54





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sistem pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan dalam hal pengelolaan kekayaan negara dari yang mulanya dilakukan secara terpusat, kemudian dilakukan perubahan dengan cara pengelolaan secara desentralisasi. Hal ini dilakukan untuk memberikan alternatif pemecahan masalah lebih mendalam dan tepat yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia. Kebijakan desentralisasi menjadi langkah strategis pemerintah pusat untuk mengatasi permasalahan lokal yang sering kali muncul di berbagai daerah baik permasalahan sosial, ekonomi, budaya dan lainnya. Selain itu, kebijakan desentralisasi juga mampu memberikan peluang besar pemerintah daerah untuk memperkuat perekonomian daerahnya masing-masing. Kebijakan desentralisasi ini berkaitan dengan munculnya otonomi daerah yang akan diterapkan untuk mengatasi permasalahan lokal daerah sekaligus meminimalisir perluasan permasalahan hingga ke pusat. Otonomi daerah dan desentralisais fiskal Indonesia telah dilaksanakan mulai tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah. Kemudian dilengkapi dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Adanya desentraslisasi fiskal dan otonomi daerah ini memiliki dampak besar dalam pengembangan dan

pembangunan daerah<sup>2</sup>. Selain itu, dengan adanya desentralisasi fiskal juga dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dan efisiensi publik.

Otonomi daerah menjadi upaya pemerintah pusat dalam mengatasi berbagai permasalahan dan melimpahkan kewenangan dan pengelolaan kekayaan daerah untuk dikelola pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan menjadi sinyal pemerintah pusat untuk melimpahkan kewenangan pada pemerintah daerah. Kewenangan tersebut meliputi kewenangan dalam segala aspek, baik keuangan maupun kekayaan alam yang berpotensi memberikan kesejahteraan bagi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bahwa keberhasilan otonomi daerah harus didukung oleh kinerja pemerintah dalam mengelola kondisi keuangan daerah yang memadai dengan tertib, efektif, didasarkan pada aturan, transparan dan bertanggung jawab<sup>3</sup>. Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dan potensi daerahnya diharapkan mampu mewujudkan daerah yang mandiri dan mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Pengelolaan daerah ini meliputi potensi yang ada di daerah tersebut baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia maupun dana dari sumber penghasilan dari potensi kekayaan daerah.

Berdasarkan UU no. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka keuangan daerah memiliki pengertian yang disesuaikan dengan UU tersebut

---

<sup>2</sup> Triyanto D, Wahyudi S.T dan Ananda C.F, “*The Effect of Capital Expenditure on Local Own-Source Revenue*” (Study In East Java Indonesia : Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, 2017), 2.

<sup>3</sup> N. M. D Indraynti dan H. Rahyuda, “*Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal di provinsi Bali*”, (E-Jurnal: Manajemen Unud,2018), 9.

bahwa Keuangan daerah merupakan seluruh hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang maupun barang yang dapat dan berpotensi memberikan manfaat dan dimiliki oleh daerah tersebut sehingga dapat memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan daerah<sup>4</sup>. Oleh karena itu, keuangan daerah ini memiliki kompleksitas terkait anggaran daerah, baik berupa kekayaan milik daerah yang menghasilkan pendapatan bagi daerah maupun anggaran terkait keperluan dalam memenuhi kebutuhan daerah tersebut. Daerah yang masih dalam tahap pembangunan memerlukan belanja modal yang lebih besar untuk mendorong peningkatan produktivitas dan pertumbuhannya. Selain itu, pasokan infrastruktur yang memadai juga menjadi instrumen penting untuk peningkatan pertumbuhan dan produktivitas daerah sehingga dapat tercapai pemenuhan kebutuhan daerah.

Paradigma pengelolaan keuangan daerah mengalami dinamika yang cukup signifikan semenjak diterapkannya otonomi daerah pada tahun 2001. Sistem pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara mandiri berorientasi pada kepentingan publik dan membawa tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah berbentuk keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang menjadi aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah ini dilakukan dengan sistem yang terintegrasi, terstruktur dan didasarkan pada peraturan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setiap

---

<sup>4</sup> H. Nursadi, *Perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah berdasarkan UU no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Hukum dan pembangunan*, 2004.

tahunnya<sup>5</sup>. Pengelolaan keuangan daerah yang dituangkan dalam anggaran daerah setiap tahunnya harus berorientasi pada kepentingan publik, disusun dengan pendekatan kinerja, terdapat keterkaitan dengan *policy maker* daerah dalam mengambil kebijakan, dan berupaya untuk menghubungkan antara APBD, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah mayoritas dilakukan dengan menggunakan pendekatan kinerja keuangan yang berorientasi pada output, konsep nilai uang (*value for money*) serta penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik<sup>6</sup>. Kinerja pemerintah dapat ditinjau dari kinerjanya dalam menentukan porsi anggaran yang disusun sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki daerahnya. Hal ini diharapkan agar dapat memberikan peningkatan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Komponen keuangan daerah yang sangat penting meliputi belanja dan pendapatan. Belanja menjadi komponen penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga dapat mencapai kesejahteraan. Hal yang sama juga pada komponen pendapatan yang menjadi wadah untuk menata dan mengelola penghasilan dari potensi yang dimiliki suatu daerah.

Belanja daerah menjadi komponen penting struktur anggaran keuangan daerah yang terdiri dari belanja modal, belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan beberapa belanja lainnya yang masuk dalam komponen anggaran. PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa

---

<sup>5</sup> E.I.Praza, “*Analisis pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal diprovinsi Jambi*”, (Jurnal Prespektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah, 2016), 1.

<sup>6</sup> R.Korompot dan J.Warongan, “*Analysis of financial performance in the goverment of north Sulawesi*”, (Jurnal Accountability, 2017),2.

belanja modal merupakan bagian dari kelompok belanja daerah yang berwujud pengeluaran dalam rangka investasi aset tetap berwujud nilai manfaat yang dapat digunakan pada aktivitas pemerintah. Salah satu yang menjadi komponen belanja paling penting adalah belanja modal karena memiliki pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan akan memiliki banyak kontribusi untuk mengangkat pergerakan perekonomian daerah. Sehingga pemerintah daerah perlu memberikan porsi yang besar sesuai keperluan daerah dalam meningkatkan pembangunan dan mempercepat proses pergerakan ekonomi melalui alokasi belanja modal yang lebih besar.

Beberapa studi empiris menunjukkan temuan bahwa alokasi belanja modal pada pemerintah daerah dipengaruhi oleh kinerja keuangan daerah khususnya rasio ketergantungan, kemandirian, efektivitas PAD dan derajat distribusi BUMD<sup>7</sup>. Studi empiris Prihastuti menemukan hasil bahwa kinerja keuangan secara langsung akan berdampak pada alokasi belanja modal. Sementara itu, dari studi empiris Nani menemukan bahwa belanja dan pendapatan suatu negara saling berhubungan satu dengan lainnya. Modal menjadi salah satu komponen belanja pemerintah yang paling penting dalam memperoleh porsi yang besar untuk membantu mendorong pergerakan ekonomi. Belanja modal ini meliputi pembiayaan dan investasi pada infrastruktur, modal utang publik dan transfer modal untuk pemerintah daerah

---

<sup>7</sup> Y.E.Restianto, *Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi kabupaten atau kota di Jawa Tengah*, (Jawa Tengah; Media riset akuntansi, 2011), 109-124.

serta lembaga pemerintah yang bersifat terdesentralisasi<sup>8</sup>. Dari studi Hayode menemukan hasil bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Terkait hal ini, pemerintah mencoba untuk meningkatkan belanja modal untuk keperluan publik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Untuk meminimalisir defisit anggaran, diperlukan pengurangan ukuran pada pengeluaran yang besar untuk dialihkan pada belanja modal dan investasi. Belanja langsung yang dituangkan dalam bentuk belanja modal dapat memberikan kontribusi pada kualitas pelayanan publik sekaligus menambah sumber pendapatan daerah. Belanja modal dengan porsi yang lebih kecil tidak mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Alokasi pada belanja modal dilakukan dengan perimbangan keuangan yang cukup baik sehingga dapat tercapai peningkatan pelayanan publik yang diharapkan oleh masyarakat<sup>9</sup>. Oleh karena itu, pemerintah harus mengendalikan pengeluaran lebih efektif terlebih untuk memprioritaskan alokasi infrastruktur. Alokasi belanja daerah yang lebih ditekankan pada belanja modal akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat daerah.

Upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui alokasi keuangan daerah melalui belanja modal

---

<sup>8</sup> A.N.Bojanic, *“The Composition of Government Expenditure and Economic Growth in Bolivia”*, (Latin American Journal of Economic, 2013), 83-105.

<sup>9</sup> N. Abu dan U. Abdullahi, *“Government Expenditure and Economic Growth in Nigeria, A Disaggregated Analysis”*, (Business and Economic Journal, 2010), 237-330.



ini juga dipengaruhi oleh kinerja keuangan daerah<sup>10</sup>. Beberapa diantara kinerja keuangan daerah dapat ditinjau dari rasio kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah ini juga dapat digunakan sebagai penilai akuntabilitas dan kemampuan pemerintah dari sisi keuangan dalam menjalankan otonomi daerah. Kinerja keuangan sebagai bentuk pencapaian yang dimiliki pemerintah daerah dari hasil realisasi pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Kinerja keuangan yang baik dapat berpengaruh pada proporsi belanja modal yang sesuai untuk pelayanan publik. Sehingga perubahan kinerja keuangan secara tidak langsung juga dapat berdampak pada perubahan proporsi alokasi belanja modal suatu daerah.

Komponen ini mencerminkan kondisi otonomi suatu daerah yang diukur dari perbandingan antara PAD dan jumlah total pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat, provinsi maupun pinjaman. Hasil studi yang dilakukan oleh Jatitmas menemukan adanya pengaruh positif signifikan antara rasio kemandirian keuangan terhadap belanja modal<sup>11</sup>. Selain itu, berbagai perdebatan empiris juga terjadi pada peranan PAD dan DAU (Dana Alokasi Umum) dalam memengaruhi belanja modal. Menganalisis dampak PAD, DAU dan DAK terhadap belanja modal di kabupaten/kota di provinsi Bali. Hasilnya ditemukan adanya pengaruh positif signifikan variabel PAD, DAU dan DAK terhadap belanja modal di provinsi Bali. Hasil serupa

---

<sup>10</sup> I.K. Arsa dan N.D.Setiawina, “Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi pemerintah kabupaten atau kota seprovinsi Bali”, (Jurnal buletin study ekonomi, 2015), 104-111.

<sup>11</sup> A.Halim, *Akuntansi keuangan daerah edisi 3*, (Jakarta : salemba empat, 2008),

pada kajian empiris menemukan bahwa variabel DAU dan PAD menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal dan kemandirian keuangan lokal. Sementara menganalisis pengaruh PAD dan dana perimbangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal namun berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, juga menemukan hasil bahwa variabel PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal di provinsi Kalimantan Selatan.

DAU juga memiliki peranan penting dalam memengaruhi belanja modal pada struktur APBD maupun APBD. Beberapa kajian empiris seperti yang dilakukan oleh mengkaji pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja modal dan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Kajian Asnawi juga menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sementara DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di pulau Jawa. Sementara penelitian dari Sari dan Wirama menemukan hasil bahwa PAD dan DAK berpengaruh positif pada alokasi belanja modal, sementara DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal di provinsi Bali. Hal serupa ditunjukkan dari hasil penelitian dalam kajiannya menemukan bahwa DAU tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Sementara PAD dan biaya pekerja memengaruhi belanja modal secara signifikan.

Beberapa komponen yang dapat berpengaruh pada belanja modal suatu daerah antara lain kondisi kinerja keuangan dan komponen PAD dalam struktur APBD. Kinerja keuangan daerah diantaranya dapat ditinjau dari rasio derajat desentralisasi yang menunjukkan derajat kontribusi PAD pada keseluruhan pendapatan daerah<sup>12</sup>. Studi empiris menemukan adanya pengaruh positif signifikan derajat desentralisasi fiskal terhadap pengalokasian belanja modal. Sementara pada studi empiris Suwandi menemukan hasil yang berbeda, derajat desentralisasi fiskal justru berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Selain rasio desentralisasi fiskal, hal lain yang dapat dilakukan untuk melihat kinerja keuangan dapat melalui rasio kemandirian keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah juga dapat diukur dari rasio efektivitas PAD yang menggambarkan kemampuan dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil suatu daerah<sup>13</sup>. Beberapa studi empiris yang dilakukan oleh Gerungan menemukan bahwa rasio efektivitas memiliki pengaruh positif signifikan pada belanja modal daerah. Sementara itu, menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan yang terjadi antara rasio efektivitas dengan belanja modal. Kemudian Tamawiyw menemukan adanya pengaruh positif namun tidak signifikan rasio efektivitas PAD terhadap belanja modal daerah.

Selain itu, rasio SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) juga menjadi indikator penilaian kinerja keuangan daerah yang dapat memengaruhi belanja modal daerah. Rasio SiLPA ini merupakan perbandingan SiLPA dan

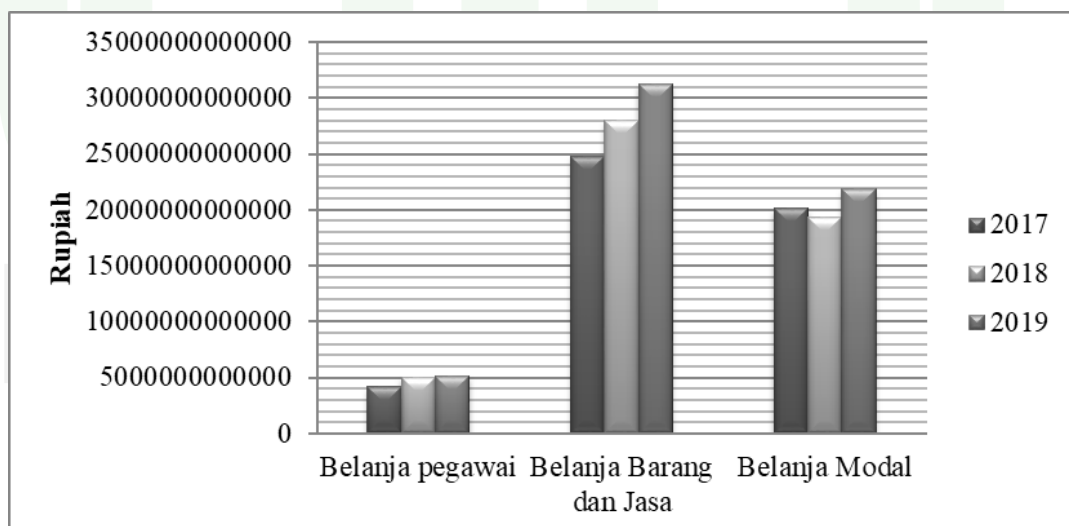
---

<sup>12</sup> Halim dan Damayanti, *pengelolaan keuangan daerah edisi 2*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2007).

<sup>13</sup> A. Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008).

total belanja daerah. Belanja modal selain dipengaruhi oleh kinerja keuangan juga dipengaruhi oleh struktur internal APBD itu sendiri yang memiliki potensi dalam kontribusinya terhadap pengembangan dan pembangunan yaitu PAD dan DAU (Dana Alokasi Umum). Komponen DAU ini lebih ditekankan untuk memaksimalkan pemerataan dan meminimalisir adanya kesenjangan.

Suatu daerah memiliki kemampuan dan proporsi berbeda-beda dalam mengalokasikan struktur APBD nya tergantung potensi dan kebutuhan daerah tersebut. Sehingga hal ini dapat memunculkan kesenjangan fiskal antar daerah dan DAU ini digunakan untuk meminimalisir adanya kesenjangan tersebut. Salah satu wilayah yang memiliki proporsi belanja yang besar dalam struktur APBD adalah Jawa Timur. Aspek pengeluaran yang masih belum dapat mengelola biayanya dengan baik karena sebagian besar dananya digunakan untuk belanja barang dan jasa yang tidak bersifat produktif.



Gambar 1.1

Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dalam Struktur APBD Tahun 2017-2019  
(Sumber: djpk.kemenkeu.go.id, 2020)

Gambar 1.1 menunjukkan pergerakan struktur belanja daerah provinsi Jawa Timur dalam struktur APBD yang didominasi oleh belanja barang dan jasa. Pada kurun waktu 3 tahun terakhir, struktur APBD pada komponen belanja langsung ini mengalami peningkatan pada setiap komponen belanja langsung yang terdiri dari belanja barang dan jasa serta belanja pegawai. Namun, hal berbeda ditunjukkan oleh komponen belanja modal yang cenderung menurun pada tahun 2018 dengan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dari jumlah anggaran belanja modal tahun 2017 sebesar Rp.20.143.262.353.620 menjadi Rp.19.329.948.492.743 kemudian pada tahun 2019, anggaran belanja modal kembali meningkat dengan nilai Rp. 21.846.053.035.476. Potensi pengembangan dan pembangunan di Jawa Timur didukung dengan kondisi sosio demografinya, diperlukan anggaran pada komponen belanja modal yang lebih besar untuk pemenuhan kebutuhan terutama infrastruktur dan sarana prasarana yang dapat meningkatkan aktivitas dan mobilitas ekonomi masyarakat.

Penelitian ini lebih menekankan pada belanja modal karena dalam struktur APBD, belanja modal dapat memberikan manfaat dalam jangka menengah dan panjang serta dapat menambah aset kekayaan daerah serta pendapatan daerah. Berdasarkan paparan tersebut, maka diperlukan suatu upaya pengalokasian struktur APBD khususnya pada belanja modal di Jawa Timur untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga belanja modal dapat lebih ditingkatkan untuk pemenuhan kebutuhan yang lebih produktif dibandingkan dengan alokasi belanja barang dan jasa. Jika penelitian ini

menggunakan beberapa rasio untuk mengukur kinerja keuangan serta komponen struktur APBD seperti DAU dan PAD dalam memengaruhi alokasi belanja daerah, studi<sup>14</sup>. Justru hanya menggunakan variabel kinerja keuangan dalam memengaruhi belanja modal di Provinsi Jambi. Studi lain dari Suryantini menggunakan pengelolaan komponen dari struktur APBD yang terdiri dari PAD, DAU, DAK dalam memengaruhi belanja modal di Provinsi Bali. Penelitian lain yang dilakukan oleh Lucky dengan menggunakan kapabilitas pembiayaan sebagai proksi dari kinerja keuangan dalam memengaruhi belanja modal.

Penelitian ini menjadi penting dikaji karena berfokus pada pengelolaan keuangan daerah terlebih pada belanja modal yang menjadi salah satu komponen utama anggaran daerah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Pada era otonomi daerah, pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara transparan dan maksimal sesuai kebutuhan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas daerah dalam mengelola kebutuhannya. Kinerja keuangan daerah menjadi fokus penting untuk menciptakan transparansi, keterbukaan serta mencapai visi misi sesuai tujuan pembangunan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian ini, dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Ibid., 3.



1. Apakah PAD berpengaruh signifikan pada Alokasi Belanja Modal pada Struktur APBD di Jawa Timur ?
2. Apakah DAU berpengaruh signifikan pada Alokasi Belanja Modal pada Struktur APBD di Jawa Timur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan pada Subbab 1.2, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh PAD pada Alokasi Belanja Modal pada Struktur APBD di Jawa Timur.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh DAU pada Alokasi Belanja Modal pada Struktur APBD di Jawa Timur.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Menambah literatur terkait kinerja keuangan daerah dan alokasi pengelolaan keuangan terlebih pada komponen belanja modal dalam meningkatkan pembangunan suatu daerah.

2. Secara Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai referensi penelitian selanjutnya untuk dikembangkan lebih lanjut terkait dengan analisis keuangan daerah khususnya pada alokasi belanja modal daerah.

3. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pengambil kebijakan dan penyusun anggaran APBD.

## E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang dimaksud penelitian adalah variabel yang diteliti, populasi atau obyek penelitian. Hal yang menjadi titik perhatian peneliti dalam proses penelitian ini meliputi :

### 1. Variabel Penelitian

#### a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri. Pendapatan asli daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

#### b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang di alokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

### 2. Indikator Variabel

#### a. Otonomi Daerah

Kebijakan baru desentralisasi dan otonomi daerah diuraikan dalam UU No. 22, 1999 tentang "Pemerintah Daerah" 1 dan UU No. 25, 1999 tentang "Keseimbangan Fiskal Antara Pemerintah Pusat dan Daerah." Kedua undang-undang ini didasarkan pada lima prinsip: 1) demokrasi, 2) partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, 3) keadilan dan keadilan, 4) pengakuan akan potensi dan keragaman di dalam

wilayah dan 5) perlu memperkuat legislatif lokal. Kelima prinsip ini mendukung dorongan Indonesia untuk reformasi, yang terus bertujuan untuk memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (dikenal sebagai KKN), dalam birokrasi pemerintah.

Pada rezim orde baru yang merupakan pusat periode reformasi melahirkan model desentralisasi yang ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Diskusi tentang otonomi daerah sangat kuat dengan membahas masalah distribusi kekuasaan secara vertikal di suatu negara. Dalam sistem ini, kekuasaan negara akan dibagi antara 'pemerintah pusat' di satu sisi, dan 'pemerintah daerah' di sisi lain. Ketika pemerintah berubah dari era Orde Baru ke era reformasi pemerintah daerah secara langsung diberikan sebelas wewenang wajib untuk dilaksanakan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur semua hal yang diserahkan oleh pemerintah pusat, dengan prinsip negara kesatuan yang berarti tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Implementasi otonomi daerah tidak hanya mengalihkan beban dan tanggung jawab kepada daerah tetapi juga mengalihkan berbagai otoritas dan hak yang dikendalikan oleh pusat ke daerah. Bahkan, untuk mengelola agenda otonomi, pemerintah daerah dan masyarakat setempat diberdayakan dengan dukungan fasilitas dan dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang sesuai.

Prinsip otonomi yang terdapat dalam UUD 1945 dirumuskan dalam UUD Nomor : 32 tahun 2004 sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum yang mengatakn, otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip “otonomi yang seluas-luasnya”, disamping itu juga menganut prinsip ”otonomi nyata dan bertanggung jawab”. Adapun yang dimaksud dengan otonomi seluasluasnya, nyata, dan bertanggung jawab”.

1) Prinsip otonomi seluas-luasnya

Urusan pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) UU ini ialah; politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi dan agama; daerah memiliki kewenangan dalam membuat kebijaksanaan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan rakyat.

2) Prinsip otonomi nyata artinya untuk menangani sesuatu urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lain nya.

3) Prinsip otonomi bertanggung jawab artinya otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benarbenar sejalan dengan tujuan dan

maksud pemberian otonomi, pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan utama dari tujuan nasional

Adanya penyempurnaan sistem pemerintahan dengan dibentuknya UU Nomor 23 tahun 2014 sebagai pengganti dari UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah. Undangundang nomor 23 tahun 2014, mengatur mengenai pola hubungan dan pembagian kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota diatur lebih rinci. Dalam peraturan UU No. 23 tahun 2014, wilayah kesatuan Republik dibag menjadi 3 tingkatan yaitu wilayah provinsi, wilayah provinsi. dibagi lagi kedalam wilayah kabupaten kota, kabupaten kota dibagi atas wilayah kecamatan dan wilayah kecamatan dibagi lagi atas wilayah desa dan kelurahan. Daerah provinsi dan kabupaten atau kota mempunyai pemerintahan daerah dan bersifat hirarki. Daerah provinsi dan daerah kabupaten kota sebagai daerah juga di tempat kan sebagai wilayah administrative sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah.

Peraturan terkait dengan pemerintah daerah mengalami perubahan kembali yaitu menjadi UU 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan dilakukan sebagai konsekuensi atas perubahan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang mengatur wakil kepala daerah dipilih secara berpasangan dengan

kepala daerah. Sehingga perlu diatur pembagian tugas antara kepala daerah dan wakil kepala daerah agar tidak terjadi disharmoni dan perlunya pengaturan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan.

Untuk menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, maka pemerintahan daerah harus diselenggarakan menurut asas penyelenggaraan pemerintahan Negara sebagai berikut yang juga sesuai dengan Pasal 58 dalam Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

- 1) Kepastian Hukum
- 2) Tertib Penyelenggaraan Negara
- 3) Kepentingan umum
- 4) Keterbukaan
- 5) Proporsionalitas, Profesionalitas
- 6) Akuntabilitas
- 7) Efisiensi
- 8) Efektivitas
- 9) Keadilan



b. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah Bagian kelima tentang Pendapatan, Belanja dan pembiayaan Pasal 285 yang menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1) pendapatan asli Daerah meliputi:

- a) pajak daerah
  - b) retribusi daerah
  - c) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan
  - d) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah
- 2) pendapatan transfer dan
- 3) lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.

c. Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan pada UU No 34 tahun 2014 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Penetapan kebijakan DAU dilakukan dengan cara menghitung luas lautan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi yang Berciri

Kepulauan dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut. DAU bagi Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan yang diperoleh dari penghitungan luas wilayah lautan termasuk untuk Daerah kabupaten/kota dalam Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan dengan proporsi 30 % (tiga puluh persen) untuk Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan dan 70 % (tujuh puluh persen) untuk Daerah kabupaten/kota dalam Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan tersebut.

Tujuan adanya alokasi DAU berdasarkan Pasal 290 UU No 23 tahun 2014 yaitu dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DAU suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal. Celah fiskal merupakan kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah. Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, baik Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan tidak terkait Pelayanan Dasar maupun Urusan Pemerintahan.

#### d. Belanja modal

Belanja modal adalah pengeluaran Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi anggaran lebih dari satu tahun dan akan meningkatkan aset atau properti daerah, dan selanjutnya akan

meningkatkan pengeluaran rutin seperti biaya pemeliharaan dalam kelompok pengeluaran administrasi umum.

Beberapa studi empiris menunjukkan temuan bahwa belanja modal pada pemerintah daerah dipengaruhi oleh kinerja keuangan daerah khususnya rasio ketergantungan, kemandirian, efektivitas PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Belanja modal ini meliputi pembiayaan dan investasi pada infrastruktur, modal utang publik dan transfer modal untuk pemerintah daerah serta lembaga pemerintah yang bersifat terdesentralisasi.

## F. Definisi Operasional

### 1. Rasio kemandirian keuangan daerah

Rasio kemandirian finansial digunakan untuk menentukan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pengembangan, dan layanan kepada orang-orang yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang disyaratkan. Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan transfer pusat, provinsi dan pinjaman. Dengan demikian, formulasinya sebagai berikut

$$\text{rasio kemandirian} = \frac{PAD}{\text{transfer pusat} + \text{provinsi} + \text{pinjaman}} \times 100\%$$

### 2. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diukur dengan perbandingan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Formulasi rasio efektivitas sebagai berikut

$$\text{rasio efektivitas} = \frac{\text{realisasi penerimaan PAD}}{\text{target penerimaan PAD}} \times 100\%$$

### 3. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakuakn pemerintah dalam rangka pembentukan modal. Alaokasi belanja modal dapat diperloha

$$\text{dari Alokasi Belanja Modal} = \frac{\text{Jumlah Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

### G. Asumsi Penelitian

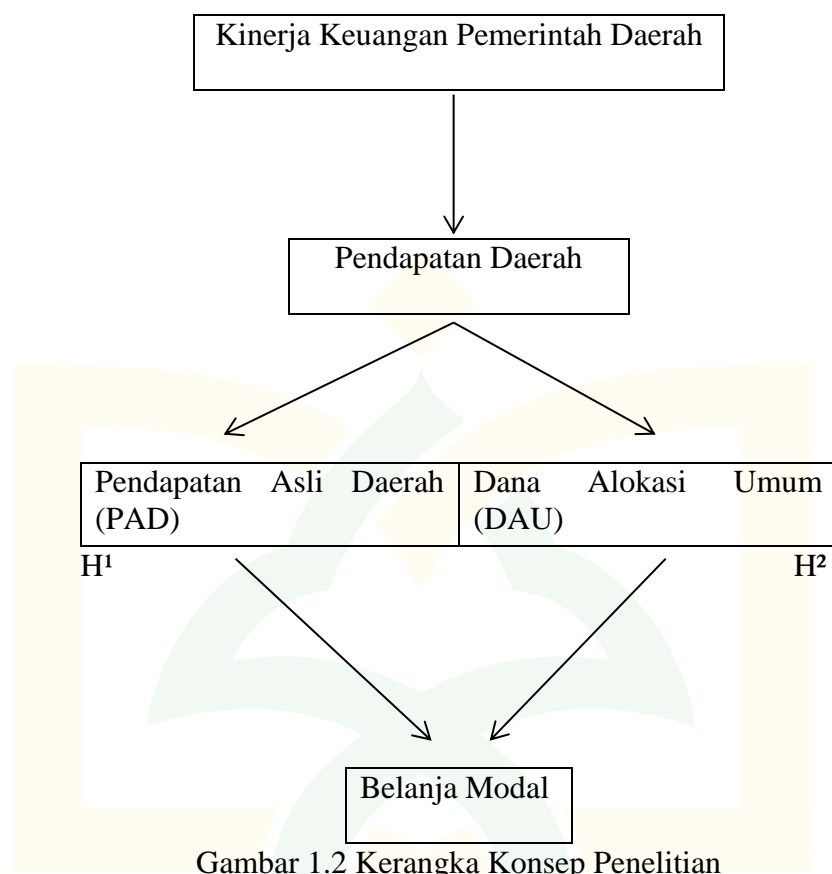
Asumsi penelitian biasa disebut juga sebagai anggapan dasar atau prostulat yaitu sebuah titik tolak pemikiran yang sebenarnya diterima oleh peneliti. Anggapan dasar harus dirumuskan secara jelas sebelum peneliti melangkah mengumpulkan data. Anggapan dasar disamping sebagai dasar berpijak yang kaku bagi masalah yang diteliti juga untuk mempertegas variabel yang menjadi pusat perhatian dan merumuskan hipotesis<sup>15</sup>.

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi baik desentralisasi demokrasi maupun desentralisasi fiskal pemerintah daerah dituntut untuk memiliki akuntabilitas yang baik untuk menciptakan *Good Government* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas pemerintah sendiri dibagi menjadi dua jenis yaitu akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan yang mana hal tersebut telah diatur pemerintah PERPRES No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

<sup>15</sup> Tim revisi buku pedoman penulisan karya ilmiah stain jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Stain Jember Press, 2014),62.

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan-peraturan tersebut dibentuk agar pemerintah daerah dapat mengatur dan mengelola pemerintahannya secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.

Besarnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan daerahnya juga dapat dilihat pada besar kecilnya pos pengeluaran belanja modal. Disisi lain, besar kecilnya pengeluaran belanja modal tidak hanya bergantung pada jumlah pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah baik berupa PAD, DAU maupun DAK, akan tetapi juga bergantung pada fleksibilitas anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah atau yang dapat disebut dengan ruang fiskal pemerintah daerah. yang juga dipengaruhi oleh baik atau buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah.. Hal ini dikarenakan pos pengeluaran belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan jumlah Aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dengan kata lain belanja modal merupakan bentuk dari investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan juga perekonomian daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa baik buruknya kinerja keuangan pemerintah dapat memengaruhi besar kecilnya pembiayaan yang digunakan oleh pemerintah untuk belanja modal.



Gambar 1.2 Kerangka Konsep Penelitian

## H. Hipotesis

Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, rumusan masalah tersebut bisa berupa pertanyaan tentang hubungan dua variabel atau lebih<sup>16</sup>.

### 1. Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal

Berkaitan dengan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri termasuk juga pendanaan pemerintah pusat dan daerah dalam mendanai kegiatan pemerintah daerah<sup>17</sup>. Oleh karena itu, dalam periode desentralisasi ini,

<sup>16</sup> Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 84.

<sup>17</sup> Jorge, Martinez-Vazquez, *The Impact of Fiscal Decentralization Issues in Theory and Challenges in Practice*, (Asian Development Bank, 2011).

pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan PAD mereka sendiri dengan memaksimalkan sumber dayanya untuk membiayai semua kegiatan pembuatan infrastruktur atau fasilitas melalui alokasi belanja modal di APBD<sup>18</sup>. Efisiensi alokasi belanja modal diwakili oleh perbandingan antara jumlah total investasi yang dikeluarkan dan target pendapatan lokal. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di daerah, pemerintah daerah perlu menetapkan target PAD di setiap tahun fiskal<sup>19</sup>.

Perbaikan dalam pengelolaan aset produktif daerah adalah upaya positif untuk meningkatkan produktivitas sumber daya daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 mengatur bahwa tujuan belanja modal adalah untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah untuk pengembangan dan pelestarian aset daerah yang memiliki nilai ekonomi selama lebih dari satu tahun. Keberhasilan belanja modal dapat diukur dengan tingkat perkembangan ekonomi daerah, Teori yang mendasari hubungan antara PAD dan belanja modal yaitu desentralisasi fiskal yang menjelaskan bahwa adanya pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah untuk mengelola keuangan dan sumber daya yang dimiliki daerah dengan perencanaan anggaran yang tepat untuk menghasilkan penerimaan daerah yang maksimal. sesuai dengan Hubungan antara belanja modal dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditunjukkan oleh pelestarian dan

---

<sup>18</sup> Blane Lewis, *Local Government Capital Spending in Indonesia : Impact of Intergovernmental Fiscal Transfers*, (Public Financial Publications, 2013), 1.

<sup>19</sup> M.R. Rochmatullah and R. Hartanto, “*Determinating The Value of Capital Expenditure Allocation in Indonesia*”, (Jurnal Ekonomi Pembangunan, 2016),17.

pengembangan aset produktif lokal<sup>20</sup>. Berdasarkan kajian empiris sebelumnya membuktikan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Namun terdapat kajian empiris terdahulu yang kontra terhadap hubungan antara PAD dengan belanja modal yang menemukan bahwa PAD dan belanja modal tidak memiliki hubungan yang signifikan<sup>21</sup>. Berdasarkan kajian teori dan empiris maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal

## 2. Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal

Dana alokasi umum (DAU) adalah transfer umum dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketidaksetaraan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. DAU (Dana Alokasi Umum) adalah dana dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kapasitas keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam konteks desentralisasi. Berdasarkan uraian dalam UU No. 33 tahun 2004, dapat disimpulkan bahwa DAU adalah sarana untuk mengatasi kesenjangan fiskal di antara daerah, dan untuk menyediakan sumber daya pendanaan daerah. Menurut UU No. 33 tahun 2004, alokasi DAU ditetapkan setidaknya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Domestik Neto sebagaimana

<sup>20</sup> A. Tuasikal,, “Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia”, (Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi, 2008), 142-155.

<sup>21</sup> Suryantini, “The Effect of Regional Financial Performance on Capital Expenditure and Economic Growth in Each Distric/Cities in Bali Province”, (International Journal of Economics, Commerce and Management, 2018).



ditetapkan dalam APBN. Proporsi distribusi DAU untuk provinsi dan kabupaten / kota ditentukan sesuai dengan keseimbangan kewenangan antara provinsi dan Kabupaten / kota<sup>22</sup>. DAU adalah salah satu komponen dan penyeimbang dalam APBN yang peruntukannya didasarkan pada konsep kesenjangan fiskal atau kesenjangan fiskal dengan perbedaan antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Teori yang mendasari hubungan antara DAU dengan belanja modal yaitu federalisasi fiskal yang menjelaskan bahwa pendelegasian wewenang oleh pusat ke daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dapat mendukung pertumbuhan ekonomi terutama dalam mengelola dana perimbangan (DAU dan DAK) untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa dana alokasi umum mempengaruhi alokasi belanja modal. Jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara DAU mentransfer dana dari pemerintah, dengan alokasi belanja daerah melalui belanja modal. Semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga meningkat. Ini karena daerah memiliki pendapatan sendiri<sup>23</sup>. Beberapa studi empiris sebelumnya menyebutkan bahwa DAU memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal Namun juga terdapat perbedaan hasil penelitian yang menemukan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara DAU

---

<sup>22</sup> Republik Indonesia, UU RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

<sup>23</sup> A.S. Nuarisa, "Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal", (Accounting Analysis Journal, 2013), 89-95.

dengan belanja modal. Berdasarkan kajian teori dan empiris maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal

Berdasarkan judul penelitian yaitu Analisis pengaruh kinerja keuangan dan pendapatan pemerintah terhadap alokasi belanja modal di provinsi jawa timur, maka:

H<sub>1</sub> : Pengaruh kinerja keuangan dan pendapatan pemerintah secara parsial terhadap alokasi belanja modal di provinsi jawa timur

H<sub>2</sub> : Pengaruh kinerja keuangan dan pendapatan pemerintah secara simultan terhadap alokasi belanja modal di provinsi jawa timur

## I. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Pendekatan

Penelitian ini adalah *explanatory research* yang merupakan penelitian kuantitatif dalam menguji hipotesis atas suatu pengaruh atau hubungan antar variabel. Dengan demikian, penelitian ini menjelaskan tentang penelitian kuantitatif yang menguji hubungan antar variabel dengan adanya hipotesis yang dibangun. Penelitian ini menguji pengaruh kinerja keuangan dan pendapatan pemerintah terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Timur.

### 2. Populasi dan Sampel

Populasi didefinisikan sebagai sekumpulan obyek akan yang diteliti. Sampel diartikan sebagai elemen-elemen dari populasi. Penelitian

ini menggunakan data panel. Data panel merupakan data gabungan dari data runtut waktu (*time series*) dan *cross section*. Data *time series* yang digunakan dalam penelitian ini pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Sementara, data *cross section* yang digunakan dalam penelitian ini adalah 38 Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Total jumlah observasi data panel yang digunakan adalah 190 Observasi.

Tabel 1.1  
Data Time Series dan Cross section

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN
1.	Kediri	2015 – 2019
2.	Malang	2015 – 2019
3.	Madiun	2015 – 2019
4.	Pasuruan	2015 – 2019
5.	Pacitan	2015 – 2019
6.	Sumenep	2015 – 2019
7.	Sampang	2015 – 2019
8.	Jember	2015 – 2019
9.	Ngawi	2015 – 2019
10.	Situbondo	2015 – 2019
11.	Pamekasan	2015 – 2019
12.	Blitar	2015 – 2019
13.	Gresik	2015 – 2019
14.	Kota Mojokerto	2015 – 2019
15.	Kota Pasuruan	2015 – 2019
16.	Banyuwangi	2015 – 2019
17.	Bangkalan	2015 – 2019
18.	Kota Batu	2015 – 2019
19.	Kota Blitar	2015 – 2019
20.	Kota Malang	2015 – 2019
21.	Mojokerto	2015 – 2019
22.	Kota Kediri	2015 – 2019
23.	Ponorogo	2015 – 2019
24.	Trenggalek	2015 – 2019
25.	Bojonegoro	2015 – 2019
26.	Kota Madiun	2015 – 2019
27.	Bondowoso	2015 – 2019
28.	Magetan	2015 – 2019
29.	Kota Probolinggo	2015 – 2019

30.	Sidoarjo	2015 – 2019
31.	Probolinggo	2015 – 2019
32.	Lumajang	2015 – 2019
33.	Jombang	2015 – 2019
34.	Lamongan	2015 – 2019
35.	Nganjuk	2015 – 2019
36.	Kota Surabaya	2015 – 2019
37.	Tuban	2015 – 2019
38.	Tulungagung	2015 – 2019

### 3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Data yang digunakan penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk)<sup>24</sup>. Data dalam laporan tahunan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) dikases resmi di website <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>.

### 4. Analisis Data

Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Secara umum, pendekatan kuantitatif lebih fokus pada tujuan untuk generalisasi, dengan melakukan pengujian statistik dan steril dari pengaruh subjektif peneliti. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi berganda adalah analisis mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. Secara umum, analisis regresi adalah analisis mengenai variabel independen dengan variabel dependen yang bertujuan untuk mengestimasi nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen

<sup>24</sup> Direktorat Jenderal Dana Perimbangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pengeluaran Pemerintah <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>, 22 maret 2020.

yang diketahui. Teknik yang digunakan untuk mencari nilai persamaan regresi yaitu dengan analisis Least Squares (kuadrat terkecil) dengan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan.

Dalam analisis regresi selain mengukur seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, juga menunjukkan bagaimana hubungan antara variabel independen dengan dependen, sehingga dapat membedakan variabel independen dengan variabel dependen tersebut. Dimana dalam penelitian ini, dua komponen dari pendapatan daerah yaitu PAD, dan DAU sebagai variabel independen, akan dianalisis pengaruhnya terhadap alokasi belanja daerah yang diukur dengan belanja tidak langsung dan belanja langsung sebagai variabel dependen.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga penutup<sup>25</sup>. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi<sup>26</sup>.

Adapun sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini terbagi menjadi empat bab, antara lain :

Bab I, Pendahuluan. Dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, definisi

---

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 245.

<sup>26</sup> Ibid., 48.

operasional, asumsi penelitian, hipotesis, metode penelitian, dan diakhiri sistematika pembahasan.

Bab II, Kajian kepustakaan, pada bab ini membahas tentang kajian kepustakaan yang didalamnya memuat penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, setelah itu masuk pada kajian teori yang dijadikan sebagai pijakan dalam melakukan penelitian.

Bab III, Penyajian data dan analisis bab ini memuat gambaran objek penelitian, penyajian data analisis dan pengujian hipotesis dan berisi pembahasan.

Bab IV, Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan terkait langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, dilanjutkan dengan saran-saran yang bermanfaat bagi perkembangan lembaga.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

##### 1. Pengertian Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian yang membahas tentang keuangan daerah khususnya belanja modal pemerintah daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah telah banyak dilakukan. Salah satu penelitian tersebut dilakukan dengan yang membahas tentang pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap belanja modal daerah dan pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada penelitian tersebut, ingin menganalisis tiga hal yaitu pengaruh kinerja keuangan pemerintah terhadap belanja modal pemerintah daerah, pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pengaruh belanja modal pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provisnis Bali pada kurun waktu 2012-2016. Obyek penelitian yang digunakan oleh yaitu seluruh kabupaten atau kota di provisi bali. Kemudian sesuai dengan tujuan dari penelitiannya menggunakan alat metode yaitu SEM (*Structural Equation Model*) dengan alat analisis PLS Program untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing varaibel yang digunakan.

Daerah di Provinsi Bali memiliki hubungan keterpengaruhan yang signifikan terhadap belanja modal. Kemudian hubungan keterpengaruhan antara variabel kinerja keuangan pemerintah dan

pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Sebaliknya, hubungan keterpengaruhan antara variabel belanja modal dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil hubungan yang signifikan.

Pada penelitian tersebut Indrayanti dan Rahyuda ingin mengetahui pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal. Periode waktu penelitian ini yaitu tahun 2012-2016 dengan obyek penelitian seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bali. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh tersebut terletak pada penggunaan proksi pada variabel kinerja keuangan<sup>27</sup>.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu PLS (*Panel Least Square*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak sepenuhnya rasio pengukuran kinerja keuangan pemerintah memiliki hubungan keterpengaruhan yang positif dan signifikan.

Pembahasan yang sama juga dilakukan oleh yang meneliti tentang pengaruh kinerja keuangan pemerintah terhadap alokasi belanja modal di Provinsi Jambi. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 2010-2013 dengan data panel di sembilan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu FEM (*Fixed Effect Model*) dengan variabel belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi masih tergolong rendah, meski demikian hasil analisis dengan metode PLS menunjukkan bahwa variabel kinerja

---

<sup>27</sup> Ibid., 10.



keuangan pemerintah secara simultan memiliki hubungan yang signifikan terhadap alokasi belanja modal. Kemudian jika dilihat dari masing-masing variabel dapat dilihat bahwa variabel tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal<sup>28</sup>.

Berbeda dengan tiga penelitian sebelumnya, meneliti tentang determinasi belanja modal di 35 pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2014-2016. Pada penelitiannya ingin mengetahui faktor faktor yang memengaruhi belanja modal pemerintah, adapun variabel-variabel yang digunakan yaitu variabel PAD (pendapatan Asli Daerah) dan DAU (Dana Alokasi Umum). Metode analisis yang digunakan dalam menganalisis data penelitian yaitu metode Regresi sederhana, sedangkan data yang digunakan untuk melakukan analisis yaitu data panel. Dari hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang digunakan yaitu variabel PAD dan DAU memiliki pengaruh yang positif terhadap belanja modal di 35 pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian yang menganalisis determinan dari belanja modal juga dilakukan yang menganalisis tentang belanja modal dan faktor-faktor yang memengaruhinya pada tahun 2011-2013 di seluruh pemerintah Daerah di Indonesia. Dalam penelitian tersebut memasukkan Variabel PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan DAU (Dana Alokasi Umum) sebagai variabel yang dapat memengaruhi belanja modal pemerintah daerah di

---

<sup>28</sup> Ibid., 4.

Indoensia. Analisis data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Regresi linier berganda pada data Panel atau (Panel Least Square / PLS). Hasil analisis dengan menggunakan metode PLS menunjukkan bahwa hanya terdapat variabel yang memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal. Kemudian variabel lainnya yaitu PAD dan DAU memiliki dampak negatif terhadap belanja modal<sup>29</sup>.

Analisis tentang belanja modal juga dilakukan oleh Sholihah melakukan analisis tentang ada atau tidaknya hubungan antara variabel alokasi belanja modal pemerintah daerah di pulau Jawa dengan variabel PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan DAU (Dana Alokasi Umum). Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2010 dengan obyek penelitian 93 pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa, hal ini menunjukkan bahwa data yang digunakan oleh yaitu data Cross Section. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis linier berganda. Hasil analisis dari regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel PAD, Dana Bagi Hasil, dan luas daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal di Pulau Jawa. Kemudian variabel DAU menunjukkan hasil yang berbeda yaitu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal di Pulau Jawa<sup>30</sup>.

Penelitian yang dilakukan berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti tentang determinasi dari nilai belanja modal

---

<sup>29</sup> Sugiyanta, "Analisis Belanja Modal dan Faktor-Faktor yang memengaruhinya pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia", (Jurnal Akuntansi Universitas Jember, 2016), 1.

<sup>30</sup> I.Sholihah dan A.Wahyudi, "Analisis Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa", (Jawa Accounting Analysis Journal, 2014).

pemerintah. Pada penelitian yang dilakukan oleh ingin mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi nilai belanja modal pemerintah daerah, namun yang menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya yaitu variabel-variabel dependen yang digunakan dalam penelitian. Variable dependen yang digunakan dalam penelitian tidak hanya memasukkan variabel keuangan daerah seperti PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan DAU (Dana Alokasi Umum) tetapi juga memasukkan variabel non keuangan seperti cakupan wilayah, jenis pemerintahan yang diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, serta lokasi pemerintahan yang juga di klasifikasikan kedalam dua kelompok yaitu di pulau jawa dan diluar pulau jawa.

Penelitian yang hampir serupa juga dilakukan oleh yang meneliti tentang dampak kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Papua Barat. Dalam penelitiannya menganalisis tentang dampak kinerja keuangan pemerintah daerah yang diproyeksi dengan pengeluaran modal terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Papua Barat. Dalam penelitian ini, memasukkan indeks pembangunan manusia sebagai pengukuran tingkat pembangunan daerah yang mana hal tersebut juga dapat mencerminkan tingkat pengeluaran pemerintah sebelumnya pada sektor modal terkait dengan pendidikan, kesehatan dan juga infrastruktur daerah. Penelitian menggunakan data panel tahunan dengan series 6 tahun (2011 - 2016) dan 6 cross-section yaitu 6 kabupaten di wilayah provinsi Papua Barat, adapun

metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis regresi data panel yaitu *Fix Effect model*<sup>31</sup>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio desentralisasi fiskal memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat, sedangkan rasio ketergantungan keuangan pemerintah daerah dan rasio belanja modal memiliki dampak yang negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia sedangkan variabel rasio efektifitas pendapatan asli daerah berdampak negatif namun tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dipaparkan dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah yang mana hal tersebut menggambarkan kekuatan keuangan pemerintah daerah dapat memengaruhi proporsi pengeluaran modal pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur berdasarkan beberapa rasio keuangan pemerintah. Selain kinerja keuangan pemerintah, terdapat beberapa faktor lain yang dapat memengaruhi proporsi pengeluaran modal pemerintah, diantaranya yaitu faktor pendapatan pemerintah yang terdiri dari PAD dan DAU. Faktor yang memengaruhi proporsi pengeluaran modal pemerintah tidak hanya dari sisi keuangan pemerintah tetapi juga dipengaruhi oleh luas wilayah dari pemerintahan tersebut.

Hal yang menjadi pembeda dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

---

<sup>31</sup> Dendy, Indramawan, *The Impact of financial performance of local government on human development index in papua*, (Papua: Sposium Nasional Keuangan Negara, 2018), 1247-1272.

ialah pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di seluruh Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 sampai tahun 2019. Selain itu tidak semua pengukuran rasio keuangan sebagai proxy dari kinerja keuangan pemerintah digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini. Rasio ketergantungan keuangan, dan derajat kontribusi BUMD. Dalam penelitian ini peneliti tidak hanya menggunakan variabel kinerja keuangan pemerintah sebagai variabel independent, tetapi juga menggunakan variabel pendapatan utama daerah yaitu PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan DAU (Dana Alokasi Umum) yang nantinya akan di analisis pengaruhnya terhadap pengeluaran modal pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Metode	Variabel	Hasil
1.	Suryantini et al. (2018)	The Effect of Regional Financial Performance on Capital Expenditure and Economic Growth in Each Distric/Cities in Bali Province	SEM ( <i>Structural Equation Model</i> )	Belanja Modal, Rasio Independensi, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan, dan Pertumbuhan Ekonomi.	- kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki hubungan keterpengaruh an yang signifikan terhadap belanja modal - Kinerja keuangan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan keterpengaruh an yang tidak

No	Nama	Judul	Metode	Variabel	Hasil
					<p>signifikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hubungan keterpengaruh an antara variabel belanja modal dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil hubungan yang signifikan</li> </ul>
2.	Indiyanti and Rahyuda (2018)	Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali	PLS ( <i>Panel Least Square</i> )	Belanja Modal, Rasio Drajat Desentralisasi Fiskla, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Tingkat Pembiayaan SILPA, derajat kontribusi BUMD, Rasio Efektifitas PAD, dan Rasio Efisiensi keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel Rasio Drajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Tingkat Pembiayaan SILPA, derajat kontribusi BUMD memiliki hubungan yang positif dan signifikan</li> <li>- Rasio Efektifitas PAD, dan Rasio Efisiensi keuangan daerah memiliki hubungan keterpengaruh an yang negatif tidak signifikan</li> </ul>
3.	Praza	Analisis	FEM	Belanja	- Derajat

No	Nama	Judul	Metode	Variabel	Hasil
	(2016)	Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Moodal di Provinsi Jambi	( <i>Fixed Effect Model</i> )	Modal, Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan, Rasio kemandirian, Rasio Derajat Kontribusi BUMD, dan Rasio Efektifitas PAD.	Desentralisasi memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah. - variabel, sedangkan variabel Rasio Ketergantungan, Rasio kemandirian, dan Rasio Derajat Kontribusi BUMD memiliki hubungan yang negatif namun tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal, - variabel Efektifitas PAD tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal.
4.	Kuntari <i>et al.</i> (2019)	Capital Expenditure of Local Government	Regresi Linie Berganda	Belanja Modal, PAD, DAU, DAK, Dana Bagi Hasil.	Seluruh variabel independen memiliki pengaruh yang positif terhadap belanja modal.
5.	Suiyanta	Analisis	PLS ( <i>Panel</i> )	Belanja	- Variabel DAK

No	Nama	Judul	Metode	Variabel	Hasil
	(2016)	Belanja Modal dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia	<i>Least Square</i> )	Modal, PAD, DAU, DAK, Dana Bagi Hasil, SILPA.	dan SILPA memiliki pengaruh yang positif terhadap belanja modal - Variabel PAD, DAU, dan Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh yang negatif terhadap belanja modal.
6.	Sholihah dan Wahyudi (2014)	Analisis Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa	Regresi Linier Berganda	Belanja Modal, PAD, Dana Bagi Hasil, DAU, dan Luas Wilayah	- PAD, Dana Bagi Hasil, dan Luas Wilayah memiliki pengaruh yang signifikan - Variabel DAU memiliki pengaruh yang Tidak Signifikan.
7.	Rachmatullah (2016)	Determinating The Value of Capital Expenditure Allocation in Indonesia Local Government	FEM ( <i>Fixed Effect Model</i> )	Belanja Modal, PAD, DAU, DAK, Ketergantungan Fiskal, Luas Wilayah, jenis Pemerintahan dan lokasi Pemerintahan	- Variabel luas wilayah, jenis pemerintahan lokasi pemerintahan, PAD, DAK, dan Ketergantungan Fiskal memiliki pengaruh yang signifikan dalam penentuan



No	Nama	Judul	Metode	Variabel	Hasil
					<p>besar kecilnya alokasi belanja modal pemerintahan daerah di Indonesia.</p> <p>- Variabel DAU tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal, hal ini dikarenakan pembiayaan yang bersumber dari DAU lebih dialokasikan untuk pengeluaran rutin.</p>
8.	Indramawan (2018)	The Impacts of Financial Performance of Local Government on Human Development Index in Papua	Analisis Data Panel (Fix Effect Model)	Indeks pembangunan Manusia, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah, Rasio Efektifitas Pendapatan Asli	- rasio desentralisasi fiskal memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat, sedangkan rasio ketergantungan keuangan pemerintah

No	Nama	Judul	Metode	Variabel	Hasil
				Daerah dan Rasio Belanja Modal	daerah dan rasio belanja modal memiliki dampak yang negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia sedangkan variabel rasio efektifitas pendapatan asli daerah berdampak negatif namun tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat

Sumber: Berbagai Sumber Diolah.

## 2. Manfaat penelitian terdahulu

Dalam melakukan suatu hal tentunya penulis juga mempertimbangkan manfaat yang akan didapatkan setelah melakukan.

Begitu juga dengan penggunaan studi pendahuluan dalam kegiatan penelitian. Adapun manfaat dari penelitian terdahulu antara lain<sup>32</sup>:

- a. Mengetahui dengan pasti apa yang akan diteliti
- b. Tahu dimana atau dengan siapa informasi dapat diperoleh
- c. Tahu bagaimana cara memperoleh data atau informasi

<sup>32</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 84.

- d. Dapat menentukan cara yang tepat untuk menganalisis data
- e. Tahu bagaimana cara mengambil kesimpulan serta memanfaatkan hasil

## **B. Kajian Teori**

### **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berkaitan dengan otonomi daerah yaitu pada UU No 22 tahun 1999 dan UU no. 25 tahun 1999, desentralisasi dalam masalah anggaran terutama berlaku untuk sisi pengeluaran. Ini tidak berlaku pada sisi fiskal atau peningkatan pendapatan sehingga tidak ada peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk pajak penghasilan atau aset<sup>33</sup>. Oleh karena itu, meskipun daerah sekarang memiliki wewenang untuk memutuskan bagaimana mengalokasikan anggaran mereka, mereka tidak diberi wewenang untuk meningkatkan pendapatan. Akibatnya, daerah masih sangat tergantung pada transfer dari pemerintah pusat untuk mereka<sup>34</sup>. Namun, UU tersebut telah diperbaharui yaitu menjadi UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah Bagian kelima tentang Pendapatan, Belanja dan pembiayaan Pasal 285 yang menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
  - 1) pajak daerah
  - 2) retribusi daerah
  - 3) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan
  - 4) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah

---

<sup>33</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

<sup>34</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1999 tentang Dana Perimbangan.

- b. Pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di Daerahnya diatur lebih lanjut dengan Perda. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah melalui sumber yang berdasarkan pada peraturan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang dirumuskan. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dirumuskan sebagai berikut<sup>35</sup> :

$$\text{PAD} = \text{HPD} + \text{RD} + \text{PLD} + \text{LPS}$$

Keterangan :

HPD : Hasil Pajak Daerah

RD : Retribusi Daerah

PLPD : Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah

LPS : Lain-lain Pendapatan yang Sah

## 2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan pada UU No 34 tahun 2014 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai

<sup>35</sup> P. Pangestu, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*, (Study Empiris Pada Pemerintah Provinsi Jambi, 2018), 15-16.

kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Penetapan kebijakan DAU dilakukan dengan cara menghitung luas lautan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut. DAU bagi Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan yang diperoleh dari penghitungan luas wilayah lautan termasuk untuk Daerah kabupaten/kota dalam Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan dengan proporsi 30 % (tiga puluh persen) untuk Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan dan 70 % (tujuh puluh persen) untuk Daerah kabupaten/kota dalam Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan tersebut.

Tujuan adanya alokasi DAU berdasarkan Pasal 290 UU No 23 tahun 2014 yaitu dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DAU suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal. Celah fiskal merupakan kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah. Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, baik Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan tidak terkait Pelayanan Dasar maupun Urusan Pemerintahan.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan anggaran pemerintah daerah yang bersumber dari celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan kebutuhan fiskal daerah dikurangi dengan kapasitas fiskal.

Kebutuhan fiskal terdiri dari kebutuhan pendanaan daerah yang digunakan untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Kapasitas fiskal merupakan sumber pendanaan daerah yang bersumber dari PAD dan Dana Bagi Hasil. Sementara, Alokasi Dasar merupakan alokasi anggaran yang didasarkan pada jumlah pegawai negeri sipil daerah. Rumus sumber DAU sebagai berikut<sup>36</sup> :

$$\text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

$$\text{Dana Alokasi Umum} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

### 3. Belanja Modal

Otonomi daerah dipandang sebagai salah satu perubahan signifikan yang dihasilkan dari reformasi sektor publik. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (kemudian direvisi oleh UU No. 32 tahun 2004 dan selanjutnya direvisi kemabali menjadi UU No 23 tahun 2014) mengatur otonomi daerah yang memberi pemerintah daerah kewenangan yang jauh lebih besar untuk mengelola daerahnya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat<sup>37</sup>. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk menggunakan sumber daya keuangan mereka untuk menentukan alokasi sumber daya untuk pengeluaran daerah; dengan berpegang pada prinsip-prinsip kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan lokal serta aspirasi masyarakat yang tercantum dalam anggaran pemerintah daerah<sup>38</sup>.

<sup>36</sup> Ibid., 18

<sup>37</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

<sup>38</sup> Anis Chariri, *capital expenditure of local government*, (Universitas diponogoro, 2019),23.

Pada Pasal 1 UU 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 298 bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal dan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyediaan sumber daya keuangan negara untuk pemerintah daerah dalam konteks pelaksanaan desentralisasi didasarkan pada penyerahan tugas oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan mempertimbangkan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Dana perimbangan adalah perwujudan dari konsep transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di Indonesia. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (Dana Bagi Hasil; DBH). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah cerminan dari kegiatan pemerintah daerah dan alokasi sumber daya yang digunakannya. Pemerintah daerah akan memilih prioritas kegiatan dan mengalokasikan dana untuk kegiatan tersebut. Kegiatan yang dipilih menyiratkan kebijakan pemerintah daerah dalam mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat. Revisi UU memberikan implikasi untuk perubahan dalam sistem pengambilan keputusan alokasi sumber daya dalam anggaran pemerintah daerah. Di era sebelumnya, penentuan jumlah alokasi

mengacu pada realisasi anggaran tahun sebelumnya dengan menambahkan sedikit peningkatan (inkremental) tanpa perubahan jenis baris / item baris<sup>39</sup>. Penganggaran semacam itu disebut item baris dan penganggaran bertahap. Otonomi daerah membuat perubahan anggaran pemerintah daerah menjadi anggaran berbasis kinerja.

Anggaran belanja modal menggambarkan kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan daerah. Anggaran daerah adalah rencana untuk kegiatan pemerintah daerah dan alokasi sumber daya. Alokasi anggaran daerah menunjukkan kebijakan pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan. Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan, yang diwujudkan dalam bentuk rencana peningkatan pendapatan dan alokasi pengeluaran dalam satuan moneter<sup>40</sup>. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh Majelis di Daerah dan ditentukan oleh peraturan daerah. APBD adalah dasar dari manajemen keuangan lokal yang merupakan panduan bagi pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada publik dalam satu tahun fiskal.

IAIN JEMBER

---

<sup>39</sup> Benjamin Smith, *"The Origins of Regional Autonomy in Indonesia: Experts and The Marketing of Political Interests"*, (Journal of East Asian Studies, 2008), 34.

<sup>40</sup> D.F. Jacobs, *Public Financial Management Technical Guidance Note Fiscal Affairs Department*, (Fiscal Affairs Department, 2009).



## BAB III

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

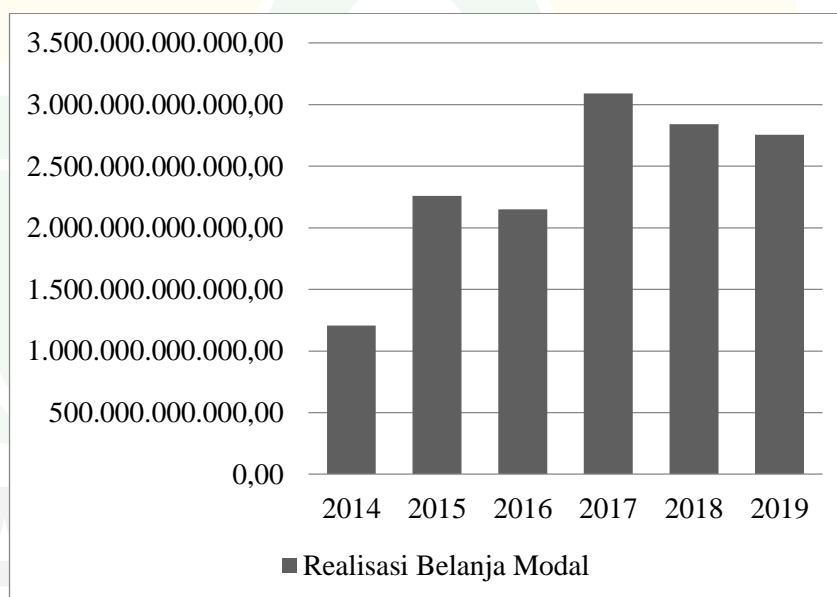
#### A. Gambaran Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan cakupan objek penelitian pada seluruh kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur dengan fokus penelitian pada belanja modal yang dipengaruhi oleh kinerja keuangan dan pos-pos APBD seperti PAD dan DAU. Data yang digunakan menggunakan data sekunder dengan *series* waktu 2015 hingga 2019 dengan *cross section* seluruh wilayah kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur. Data diperoleh dari sumber sekunder yang berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)). Pada struktur APBD terdapat instrumen utama pendapatan dan belanja daerah. Salah satu komponen belanja daerah yang memiliki peranan sangat penting bagi pelaksanaan pengelolaan daerah adalah komponen belanja modal. Jenis belanja modal ini terdiri dari beberapa komponen dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan publik daerah dan fasilitas umum lainnya.

Belanja modal menjadi komponen sangat penting bagi suatu daerah dalam mendorong aktivitas publik serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pada aset daerah. Belanja modal meliputi belanja yang meliputi aset daerah untuk keperluan publik seperti tanah, gedung, bangunan dan aset tak berwujud lainnya. Aset-aset tersebut selain berguna untuk meningkatkan pelayanan publik untuk masyarakat daerah, juga dapat bermanfaat untuk

meningkatkan pos-pos pendapatan daerah seperti penghasilan pajak dan retribusi dan penghasilan lain-lain PAD yang sah dari sewa gedung, bangunan maupun alat-alat lainnya. Di Jawa Timur, realisasi belanja modal dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Hal ini tercermin dari jumlah realisasi belanja modal yang bersumber dari laporan keuangan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur dan BPS Jawa Timur.

Penyerapan belanja modal suatu daerah mengalami variasi yang diperlukan daerah yang dapat dituangkan dapat rencana anggaran berbeda-beda. Pada provinsi Jawa Timur, kondisi ini juga mengalami hal demikian yang dideskripsikan pada Gambar 3.1 sebagai berikut.



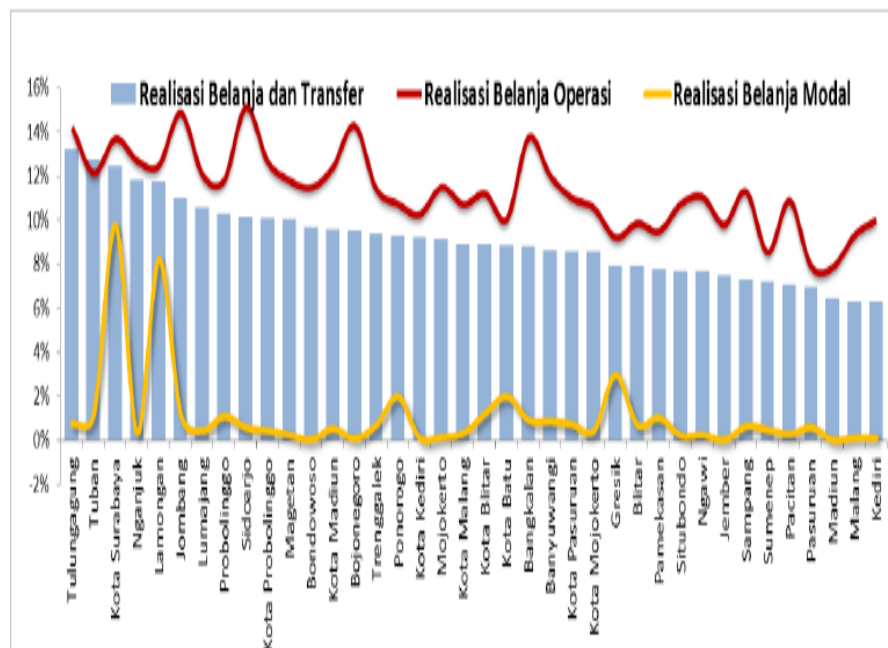
**Gambar 3.1 Realisasi Belanja Modal di Jawa Timur**

Sumber: laporan keuangan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur dan BPS Jawa Timur, 2020

Realisasi pada belanja modal di Jawa Timur mengalami fluktuasi yang cukup signifikan terlihat pada kinerja realisasi belanja modal di tahun 2016 dan 2018. Pada tahun 2014 dan 2015 menunjukkan peningkatan realisasi belanja modal dari Rp. 1,207,456,633,373.80 meningkat pada 2015 mencapai nominal Rp.2,258,320,071,661.60. Pasca peningkatan ini, realisasi belanja modal mengalami penurunan menjadi Rp. 2,150,594,111,043 di tahun 2016. Pada tahun 2017, penyerapan belanja modal kembali meningkat yang ditunjukkan dari angka nominal realisasi sebesar Rp.3,090,055,683,754 kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan penyerapan anggaran belanja modal menjadi Rp. 2,840,552,249,709. Fluktuasi penyerapan belanja modal yang berwujud realisasi belanja modal yang cenderung menurun ini dapat dilatar belakangi oleh beberapa faktor antara lain dapat bersumber dari faktor internal daerah, rencana alokasi anggaran yang kurang efisien sehingga mengakibatkan pencapaian tidak mencapai target maupun perbedaan keperluan tiap tahun dalam menganggarkan pos-pos belanja modal yang diperlukan suatu daerah.

Sementara itu, pada pos belanja modal di masing-masing daerah kabupaten/kota di Jawa Timur juga menunjukkan penyerapan yang berbeda.

IAIN JEMBER



**Gambar 3.2 Realisasi Belanja dan Transfer Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2018**

Sumber: BPKAD Jawa Timur dan Laporan Perekonmian Provinsi Jawa Timur oleh Bank Indonesia, 2019

Realisasi penyerapan belanja modal pada tahun 2018 tertinggi dicapai oleh beberapa wilayah seperti Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Ponorogo dan Kota Batu. Sementara pada kabupaten dan kota lain menunjukkan angka penyerapan yang cenderung landai. Kondisi ini berarti jumlah penyerapan pada wilayah lainnya di Jawa Timur masih relatif sedang dibandingkan beberapa wilayah tersebut. Besar kecilnya realisasi yang dicapai dari bergantung pada perencanaan yang dianggarkan masing-masing daerah.

## B. Analisis dan Pengujian Hipotesis

### 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Analisis Deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data penelitian yang bertujuan mempermudah dalam memahami perkembangan data penelitian. Hasil uji deskriptif yang digunakan berupa nilai standar deviasi, rata-rata, nilai is dan Pengujian Hipotesis maksimum, dan nilai minimum. Dengan demikian, hasil uji analisis Deskriptif akan dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 3.2.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standart Deviasi
Belanja Modal	3579652664	2517891658246	365618787618,2	342150820858,6
PAD	34304779323	5161844571172	410894056884,1	678694220043,5
DAU	378916109000	1716472214000	949912149339,5	302346427856

Perkembangan rata-rata belanja modal di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2015-2019 sebesar Rp.365.618.787.618. Selama perkembangan belanja modal di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2015-2019 pernah mencapai nilai maksimum sebesar Rp. 2.517.891.658.246 di Kota Surabaya pada tahun 2017 dan nilai minimum sebesar Rp. 3.579.652.664 di Kota Kediri pada tahun 2019. Nilai minimum yang lebih besar dari pada nilai rata-rata menunjukkan pada periode penelitian ini nilai belanja modal cukup besar. Di sisi lain, nilai standart deviasi sebesar Rp. 342.150.820.858,6 lebih besar dari nilai rata-rata yaitu Rp.

365.618.787.618 menunjukkan terdapat banyaknya variasi dalam pengungkapan nilai belanja modal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur pada periode penelitian mencapai nilai rata-rata sebesar 410894056884,1. Pada periode 2015-2019, variabel PAD pernah mencapai nilai maksimum sebesar Rp. 5.161.844.571.172 di kota Surabaya pada tahun 2017 dan nilai minimum sebesar Rp. 34.304.779.323 di Kota Mojokerto pada tahun 2019. Nilai minimum sebesar Rp. 34.304.779.323 yang lebih besar dari nilai rata-rata 410894056884,1 menunjukkan pada periode penelitian ini nilai PAD cukup besar. Di sisi lain, nilai standart deviasi sebesar Rp. 678.694.220.043,5 lebih besar dari nilai rata-rata yaitu Rp. 410.894.056.884,1 menunjukkan terdapat banyaknya variasi dalam pengungkapan nilai PAD.

Rata-rata perkembangan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) pada periode penelitian ini di Provinsi Jawa Timur mencapai Rp. 949.912.149.339,5. Variabel DAU selama periode 2015-2019 di Provinsi Jawa Timur mencapai nilai maksimum sebesar Rp. 1.716.472.214.000 di Kabupaten Malang tahun 2019 dan nilai minimum sebesar Rp. 378.916.109.000 di Kota Mojokerto pada tahun 2018. Nilai minimum yang lebih besar dari pada nilai rata-rata menunjukkan pada periode penelitian ini nilai DAU cukup besar. Di sisi lain, nilai standart deviasi sebesar Rp. 302.346.427.856 lebih kecil dari nilai rata-rata yaitu Rp.

949.912.149.339,5 menunjukkan tidak terjadi banyak variasi dalam pengungkapan nilai DAU.

## 2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik digunakan dalam penelitian ini untuk menghasilkan estimasi linier yang tidak bias atau BLUE (*Best Linieer Unbias Estimator*). Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi

### a. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui adanya distribusi normal atau tidak pada data. Data yang memiliki karakteristik terdistribusi normal akan memberikan model regresi yang baik. Pengujian dari uji normalitas menggunakan metode *Jarque-Bera* yang dihasilkan dari *residual diagnostics*. Model regresi mempunyai residual yang terdistribusi normal jika nilai probabilitas yang dihasilkan lebih besar dari 0,05 ( $\alpha = 0,05$ ).

**Tabel 3.2.2 Hasil Uji Normalitas**

	Nilai	Syarat	Keterangan
Jarque-Bera	1,671	Nilai JB dibawah 2	Terdistribusi normal
Probabilitas	0,676	lebih besar dari 0,005	Terdistribus normal

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan nilai Jarque-Bera sebesar 167,088 dibawah 2 disertai nilai probabilitas sebesar 0,00 lebih besar dari 0,05 menunjukkan data terdistribusi normal. Dengan

demikina, menunjukkan data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan guna mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat diantara variabel independen. Suatu model regresi linear akan menghasilkan estimasi yang baik apabila model tersebut tidak mengandung multikolinieritas. Untuk menguji multikolinieritas, dalam penelitian ini menggunakan nilai korelasi antar variabel bebas yang dihasilkan dari pengujian *coefficient diagnostics*. Model tidak mempunyai gejala multikolinieritas ketika nilai korelasi tidak melebihi 0,90.

**Tabel 3.2.3 Hasil Uji Multikolinieritas**

	PAD	DAU
PAD	1.00	0.50
DAU	0.50	1.00

Tabel 3.2.3 menjelaskan tentang hasil uji multikolinieritas pada variabel bebas atau independen. Hasil pada uji multikolinieritas menunjukkan pada setiap hubungan antar variabel dependen tidak memiliki nilai korelasi melebihi 0,90, kecuali hubungan variabel itu sendiri. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengandung multikolinieritas.

c. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas merupakan suatu keadaan yang dalam hal ini varian dari kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua nilai



variabel bebas. Salah satu cara dalam menguji heterokedastisitas pada data panel dengan menggunakan uji Glejser. Uji Glejser menggunakan residual yang dijadikan absolut di estimasi dengan variabel independen. Ketika nilai probabilitas diatas 5% menunjukkan tidak adanya heterokedastisitas pada model.

**Tabel 3.2.4 Hasil Uji Heterokedastisitas**

	<b>t-statistik</b>	<b>Probabilitas</b>
PAD	-1.083844	0.3893
DAU	1.237594	0.2179

Tabel 3.2.4 menjelaskan tentang hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan metode Glejser. Setiap variabel independen memiliki probabilitas diatas 5%. Dengan demikian, menjelaskan bahwa model penelitian tidak memiliki permasalahan heterokedastisitas.

#### d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Pada penelitian ini untuk menguji ada tidaknya gejala autokorelasi menggunakan uji *Durbin-Watson (DW test)*.

**Tabel 3.2.5 Hasil Uji Autokorelasi**

<b>Nilai Durbin Watson</b>	<b>Nilai Du</b>	<b>Ketentuan</b>	<b>Hasil</b>
2,007	Nilai dU = 1,820 Nilai (4-dU) = 2,172	terletak antara dU dan (4-dU)	Tidak ada autokorelasi

Tabel 3.2.5 menjelaskan tentang nilai uji autokorelasi pada model penelitian ini. Hasil menunjukkan nilai DW sebesar 2,007 berada diantara nilai dU sebesar 1,820 dan (4-dU) sebesar 2,172. Dengan demikian, tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi linier penelitian ini.

### **3. Analisis Panel Least Square (PLS)**

Metode *Panel Least Square* (PLS) digunakan dalam penelitian untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap dependen dengan jenis data panel. langkah sebelum melakukan uji estimasi dalam metode *Panel Least Square* (PLS) adalah melakukan uji pemilihan model terbaik. Uji pemilihan model terbaik digunakan untuk memilih model mana yang bagus untuk diestimasi. Pemilihan model dilakukan dengan uji chow yang membandingkan model *Pooled Least Square* (PLS) dengan *Fixed Effect Model* (FEM). Uji Hausman yang ditujukan untuk membandingkan model *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) dan uji Lagrange Multiplier yang digunakan untuk memiliki model *Random Effect Model* (REM) atau *Pooled Least Square* (PLS).

**Tabel 3.3 Hasil Uji Pemilihan Model Data Panel**

<b>Metode</b>	<b>Probabilitas</b>	<b>Hasil Model Terbaik</b>
Uji Chow	0,000	<i>Fixed Effect Model</i> (FEM)
Uji Hausman	0,000	<i>Fixed Effect Model</i> (FEM)
Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	0,104	<i>Pooled Least Square</i> (PLS)

Pada hasil uji Chow dengan nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dari nilai alpha ( $\alpha = 0,05$ ) menunjukkan *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan model yang terbaik dari pada *Pooled Least Square* (PLS). Sementara, pada uji hausman dengan nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dari nilai alpha ( $\alpha = 0,05$ ) menunjukkan *Fixed Effect Model* (FEM) lebih baik dari pada *Random Effect Model* (REM). Di sisi lain, pengujian *lagrange multiplier* dengan nilai probabilitas sebesar 0,104 yang lebih besar dari alpha ( $\alpha = 0,05$ ) menunjukkan *Pooled Least Square* (PLS) lebih baik dari pada *Random Effect Model* (REM). Dengan demikian, kesimpulan yang didapatkan dalam hasil pemilihan model adalah *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan model yang terbaik untuk melakukan estimasi dalam penelitian ini.

*Fixed Effect Model* (FEM) menjadi model yang terbaik untuk dilakukan estimasi pada penelitian ini. Pada hasil *Fixed Effect Model* (FEM) akan menjelaskan bagaimana pengaruh PAD, DAU, rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan dan rasio SiLPA terhadap belanja model di Provinsi

Jawa Timur. Hasil dari *Fixed Effect Model* (FEM) akan dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 3.4. Hasil Analisis *Fixed Effect Model* (FEM)**

Variabel	Koefisien	Std. Error	Probabilitas
Konstanta	34,00	29,547	0,251
PAD	1,815	0,227	0,000*
DAU	-2,051	1,119	0,068***

\*  $\alpha=1\%$ , \*\*  $\alpha=5\%$ , \*\*\*  $\alpha=10\%$

Berdasarkan pada hasil analisis *Fixed Effect Model* (FEM) dapat dituliskan persamaan regresi linier sebagai berikut:

$$Y = 34,00 + 1,815X_1 - 2,051X_2 + e$$

Berdasarkan pada Tabel 3.4 menjelaskan tentang hubungan PAD, DAU, rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan dan rasio SiLPA terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Timur. Hasil analisis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai koefisien pada variabel PAD menunjukkan bernilai positif yang diartikan terdapat hubungan searah. Nilai probabilitas PAD sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai alpha ( $\alpha = 1\%$ ) menunjukkan memiliki hubungan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian, ketika PAD mengalami peningkatan akan memberikan peningkatan kepada belanja modal di Provinsi Jawa Timur.
- b. Nilai koefisien pada variabel DAU yang bernilai negatif mengartikan terdapat hubungan berlawanan. Nilai probabilitas sebesar 0,068 lebih kecil dari nilai alpha ( $\alpha = 10\%$ ) yang mengartikan memiliki hubungan

signifikan terhadap belanja modal, Dengan demikian, ketika DAU meningkat akan mengurangi belanja modal di Provinsi Jawa Timur.

#### 4. Uji Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara 0 dan 1. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

**Tabel 3.5 Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model	R-Square	Adjusted R Square	Std. Error of regression
<i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	0,937	0,917	0,379

Nilai pada *Adjusted R Square* ( $R^2$ ) menunjukkan sebesar 0,917 atau 91% yang mengartikan variabel independen secara simultan dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 91%. Sementara, 9% sisanya dapat dijelaskan oleh variabel di luar model. Dengan demikian, model yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan model yang bagus.

#### 5. Uji Hipotesis

##### a. Uji t-statistik

Uji t-Statistik merupakan pengujian parsial yang dilakukan untuk menguji pengaruh setiap variabel independent terhadap variabel

dependen. Pengujian ini dapat dilihat melalui hasil probabilitas (t-statistik) dari setiap variabel independen  $\leq \alpha$  maka  $H_a$  diterima. Sebaliknya jika hasil probabilitas (t-statistik) dari setiap variabel independent  $\geq \alpha$  maka  $H_a$  ditolak.

Berdasarkan pada Tabel 3.6 menjelaskan uji t-statistik pada penelitian ini. Nilai probabilitas PAD sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai alpha ( $\alpha = 1\%$ ) menunjukkan memiliki hubungan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian, ketika PAD mengalami peningkatan akan memberikan peningkatan kepada belanja modal di Provinsi Jawa Timur

**Tabel 3.6 Hasil uji t-statistik**

Variabel	Std. Error	t-statistik	Probabilitas
Konstanta	29,547	1,150	0,251
PAD	0,227	7,975	0,000*
DAU	1,119	-1,833	0,068***

\*  $\alpha=1\%$ , \*\*  $\alpha=5\%$ , \*\*\*  $\alpha=10\%$

Nilai probabilitas sebesar 0,068 lebih kecil dari nilai alpha ( $\alpha = 10\%$ ) yang mengartikan memiliki hubungan signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian, ketika DAU meningkat akan mengurangi belanja modal di Provinsi Jawa Timur. Nilai probabilitas rasio derajat desentralisasi sebesar 0,006 lebih kecil dari nilai alpha ( $\alpha = 1\%$ ) menunjukkan memiliki hubungan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian, ketika rasio derajat desentralisasi mengalami peningkatan akan mengurangi belanja modal di Provinsi Jawa Timur. Nilai probabilitas sebesar 0,007 lebih kecil

dari nilai alpha ( $\alpha = 1\%$ ) yang mengartikan memiliki hubungan signifikan terhadap belanja modal, Dengan demikian, ketika rasio kemandirian meningkat akan mengurangi belanja modal di Provinsi Jawa Timur.

Nilai probabilitas rasio efektivitas PAD sebesar 0,243 lebih besar dari nilai alpha ( $\alpha = 10\%$ ) menunjukkan tidak memiliki hubungan signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian, perkembangan rasio efektivitas PAD tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Timur. Nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai alpha ( $\alpha = 1\%$ ) yang mengartikan memiliki hubungan signifikan terhadap belanja modal.

b. Uji F-statistik

Uji F-Statistik atau uji kelayakan model merupakan pengujian yang dilakukan untuk menguji pengaruh simultan variabel dependen (Y) dengan independent (X). Ketika terdapat pengaruh yang simultan antara variabel dependen (Y) dengan independent (X) maka model yang digunakan masuk dalam kriteria cocok atau fit. Pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat pada hasil regresi yang dilakukan dengan program *Eviews*, yaitu dengan membandingkan tingkat signifikansi. Apabila tingkat signifikansi  $p\text{-value} \leq \alpha$  maka  $H_0$  diterima. Sebaliknya apabila signifikansi  $p\text{-value} \geq \alpha$  maka  $H_0$  ditolak.

**Tabel 3.7. Hasil Uji F-Statistik**

<b>Model</b>	<b>Sum Square</b>	<b>F-Statistik</b>	<b>Prob. (F-statistik)</b>
<i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	20,812	48,225	0,000

Hasil uji F-statistik menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,00 lebih kecil dari nilai alpha ( $\alpha = 1\%$ ) yang menunjukkan  $H_a$  diterima. Hasil tersebut menjelaskan bahwa variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara simultan.

### **C. Pembahasan**

Pada subbab ini akan menjelaskan hasil dari analisis data yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Pembahasan berupa hasil hipotesis yang disertai dengan dukungan empiris dan berlandaskan pada landasan teori penelitian ini. Variabel yang menjadi objek pembahasan yaitu pengaruh dari PAD dan DAU terhadap belanja modal.

#### **1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil uji statistik pada Tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari PAD sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari pada nilai ( $\alpha$ ) 0,01. Hasil tersebut menjelaskan bahwa PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap besaran dari belanja modal di Jawa Timur. Dengan demikian, berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Hasil uji hipotesis juga menunjukkan bahwa pengaruh dari PAD bersifat positif dan signifikan dengan nilai koefisien 1,118830 yang menjelaskan bahwa ketika terjadi peningkatan PAD maka akan



berpengaruh pada bertambahnya jumlah realisasi belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil studi empiris sebelumnya yang menyimpulkan bahwa PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian hasil penelitian ini menentang studi empiris sebelumnya yang menyebutkan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan hasil analisis data hubungan PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal, dengan demikian mengindikasikan bahwa semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pengeluaran pemerintah untuk belanja modal, dan sebaliknya jika daerah memiliki PAD yang lebih rendah maka belanja modal pemerintah daerah juga rendah. Hasil penelitian ini sejalan dengan UU No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan PAD disusun sesuai dengan kebutuhan tata kelola dan kapabilitas pendapatan daerah. Itu berarti bahwa dalam setiap persiapan APBD, jika pemerintah daerah akan mengalokasikan belanja modal maka harus sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Antara PAD dan belanja modal ada hubungan timbal balik dalam keuangan pemerintah daerah<sup>41</sup>. Kondisi ini sesuai dengan tujuan dari adanya teori desentralisasi fiskal yang mendukung pemerintah daerah untuk lebih kompeten dalam pembangunan daerah yang telah diamanahkan oleh pemerintah pusat. Pendapatan daerah mewakili kemampuan pemerintah daerah untuk

---

<sup>41</sup> Ibid., 39.

menyediakan dana sebagai sumber manajemen daerah dalam periode tertentu. Oleh karena itu, pemerintah harus mendorong pencapaian optimalisasi sumber yang mendorong peningkatan pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan daerah diharapkan dapat mengurangi proporsi pendapatan transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Selain itu, peran transfer pendapatan dalam bentuk bagi hasil juga tidak dapat dikecualikan karena peran daerah mempengaruhi besarnya pembagian keuntungan.

## 2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa DAU secara parsial memiliki pengaruh terhadap realisasi belanja modal yang dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,0685 yaitu kurang dari ( $\alpha$ ) 0,10. Berdasarkan hasil tersebut maka  $H_2$  diterima dan  $H_0$  ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa DAU memiliki pengaruh signifikan terhadap realisasi belanja modal di Jawa Timur. Hasil uji statistik juga menunjukkan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap realisasi belanja yang ditunjukkan dengan nilai koefisiensi -2,050785. Berdasarkan nilai koefisiensi tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika dana alokasi umum meningkat maka realisasi belanja modal mengalami penurunan. Hasil penelitian ini sejalan dengan studi empiris sebelumnya yang menyebutkan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian hasil penelitian ini menentang studi empiris sebelumnya yang menjelaskan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa DAU yang merupakan transfer umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketidaksetaraan horisontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah belum terealisasi dengan maksimal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa DAU mempengaruhi pengeluaran modal secara negatif dan signifikan. DAU memiliki fungsi untuk mengurangi kesenjangan antara Daerah dan Kota di seluruh Indonesia. Hasil yang menunjukkan baik DAU dan belanja modal masih negatif menyiratkan bahwa semakin tinggi transfer DAU dari pemerintah pusat maka semakin rendah kesenjangan fiskal, sehingga kontribusi pada belanja modal juga lebih rendah. DAU yang lebih rendah menyiratkan kesenjangan fiskal yang lebih tinggi, sehingga memberikan kontribusi yang lebih tinggi pada belanja modal<sup>42</sup>. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan tata kelola desentralisasi untuk mengalokasikan dana alokasi umum sudah dapat dioptimalkan dan tidak ada ketergantungan yang signifikan dari pemerintah daerah pada pemerintah pusat. Oleh karena itu, setiap daerah di sekitarnya dapat meningkatkan dana alokasi umum dengan meningkatkan dana perimbangan dan memanfaatkan dana alokasi umum yang dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan di daerah. Kegiatan daerah yang dimaksud seperti urusan regional dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai fasilitas dasar dan pencapaian pelayanan publik dasar. standar tertentu untuk mendorong percepatan pembangunan

---

<sup>42</sup> Armawaddin, *Dominant factors affecting realization in southeast sulawesi*, (Sulawesi: Jurnal Ekonomi Pembangunan, 2019), 16.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis, penelitian ini menemukan hasil terkait dengan pengaruh kinerja keuangan dan komponen APBD terhadap belanja modal di seluruh wilayah kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur. Hasil tersebut sebagai berikut:

1. PAD menunjukkan hasil positif signifikan dalam memengaruhi belanja modal di provinsi Jawa Timur.
2. DAU menunjukkan hasil negatif signifikan dalam memengaruhi belanja modal di provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah dipaparkan pada Sub bab terdapat beberapa keterbatasan pada penelitian ini yaitu:

1. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data Panel dengan jumlah *Cross Section* 38 Kabupaten dan Kota serta time series 5 tahun (2015-2019) di seluruh Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, hasil analisis ini tidak dapat menjelaskan secara rinci variabel-variabel yang dapat memengaruhi belanja modal di masing-masing daerah di Jawa timur, mengingat karakteristik dan kinerja keuangan pemerintah dari masing-masing daerah sangat berbeda.
2. Hasil regresi dari data panel pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang memengaruhi belanja modal di daerah Kabupaten dan Kota Di Jawa Timur secara signifikan hanya berpengaruh sebesar 91,6 %, hal

tersebut menunjukkan bahwa 7,4 % pengeluaran belanja modal pemerintah dipengaruhi oleh variabel lain.

## **B. Saran.**

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan dari penelitian ini, maka saran yang dapat dipertimbangkan untuk digunakan baik untuk penelitian selanjutnya pada ruang lingkup penelitian ini maupun untuk instansi terkait yaitu:

1. Pada penelitian selanjutnya peneliti dapat menggunakan data longitudinal dan alat analisis data longitudinal guna mengkaji dan menganalisis variabel-variabel yang dapat memengaruhi pengeluaran belanja modal dari masing-masing daerah.
2. Peneliti pada penelitian selanjutnya juga dapat memasukkan beberapa variabel yang mungkin dapat memengaruhi pengeluaran belanja modal pemerintah seperti variabel luas wilayah, variabel Rasio Harmony, Variabel perencanaan pembangunan daerah dan variabel lainnya.

Implikasi dari hasil penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua hal yaitu Implikasi teoritis yang berkaitan perkembangan teori belanja modal dan kinerja keuangan pemerintah daerah serta implikasi praktis yang berkaitan dengan belanja modal pemerintah daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur.

1. Implikasi Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis yang berkaitan dengan pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah,

Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

## 2. Implikasi Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi praktisi dan pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan peningkatan pengeluaran belanja modal pemerintah daerah, kinerja keuangan pemerintah, dan Pendapatan Asli Daerah khususnya pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu, N dan Abdullahi, U.2010. *Government Expenditure and Economic Growth in Nigeria, 1970-2008: A Disaggregated Analysis*. Business and Economic Journal, 4(3): 237-330.
- Armawaddin, Muhamad, and Ahmad. 2019. “*DOMINANT FACTORS AFFECTING CAPITAL REALIZATION IN SOUTHEAST SULAWESI.*” Jurnal Ekonomi Pembangunan 16 (1).
- Arsa, I K dan Setiawina, N.D.2015. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2006 S.D. 2013*. Jurnal Buletin Studi Ekonomi, 20 (2):104-111
- Bojanic, A. N. 2013. *The Composition of Government Expenditure and Economic Growth In Bolivia*. Latin American Journal of Economic, 50(1): 83-105.
- Chariri, Anis, dkk. 2019. “*Capital Expenditure of Local Governments*”. Academy of Accounting and Financial Studies Journal 23 (January).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Semarang: Cv. Asy Syifa' 85.
- Direktorat Jenderal Dana Perimbangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pengeluaran Pemerintah <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>. Diakses Tanggal 22 Maret 2020, 18;06 WIB.
- Halim, A dan Damayanti, T. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah edisi 2*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Halim, A. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indiyanti, N. M. D dan Rahyuda, H. 2018. *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali*. E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7, No. 9, 2018: 4713 4746 ISSN: 2302-8912 DOI: <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2018.v7.i09.p4>
- Indramawan, Dendy. 2018. *The Impact of Financial Performance of Local Governments on Human Development Index In Papua*. Sipsium Nasional Keuangan Negara 2018. BPPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hal 1247-1272.
- Indrayanti, N. M. D., dan Rahyuda, H. 2018. *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Bali*. E-Jurnal Manajemen Unud Vol. 7, No. 9, 2018. Hal 4713 4746.



- Jacobs, D. F. 2009. '*Public Financial Management Technical Guidance Note Fiscal Affairs Department*', Fiscal Affairs Department IMF, (April).
- Kartika, D. Setiawan, A.B., dan Kusuma, I.C. 2016. *Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi PAD pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten SukaBumi*. Jurnal Sosial Humaniora. Vol 7 No. 2 Oktober 2017. ISSN 2087-4928.
- Korompot, R dan Warongan, J. 2017. *Analysis of Financial Performance in The Government of North Sulawesi*. Jurnal Accountability Vol. 06, No. 02, 2017, 09 – 19 9.
- Lewis, Blane. 2013. "*Local Government Capital Spending in Indonesia : Impact of Intergovernmental Fiscal Transfers*". Public Financial Publications, Inc., no. January. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5850.2013.12002.x>.
- Martinez-Vazquez, Jorge. 2011. "*The Impact of Fiscal Decentralization Issues in Theory and Challenges in Practice*". Asian Development Bank. <http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S1793993310000160>.
- Nuarisa, S. A., 2013. *Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Accounting Analysis Journal 2 (1):89-95. Available at: [http://journal.unnes.ac.id/artikel\\_sju/aaj/1163](http://journal.unnes.ac.id/artikel_sju/aaj/1163).
- Nursadi, H. (2004). *Perubahan Paradigma Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Hukum dan Pembangunan
- Pangestu, P, dkk. 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal: Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Jambi 2009-2017*. April, 15–16.
- Praza, E. I, 2016. *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jambi*. Jurnal Prespektif pembiayaan dan pembangunan daerah Vol. 4 No 1. Juli-September 2016. ISSN 2338-4603
- Rochmatullah, M. R. and Hartanto, R. 2016. '*DETERMINATING THE VALUE OF CAPITAL EXPENDITURE ALLOCATION IN INDONESIA LOCAL GOVERNMENT*', Jurnal Ekonomi Pembangunan, 17(December).
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Smith, Benjamin. 2008. "*The Origins of Regional Autonomy in Indonesia: Experts and the Marketing of Political Interests*". Journal of East Asian Studies 8: 211–34.

- Sugiyanta. 2016. *Analisis Belanja Modal dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia*. Jurnal Akuntansi Universitas Jember. Vol. 14 No. 1 Juni 2016.
- Suharsimi, Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 84.
- Sularso, HH dan Restianto, Y.E. 2011. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. Media Riset Akuntansi, 1 (2):109-124
- Suryantini, N.P.S, dkk. 2017. The Influence of DAU (General Allocation Fund) and DAK (Special Allocation Fund) on Capital Expenditure of Bali Province. *Economics & Business Solutions Journal* Volume 1, Number 2, 2017, 1-9
- Tim revisi buku pedoman penulisan karya ilmiah stain jember. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Stain Jember Press. Hal 62.
- Triyanto, D, dkk. 2017. *The Effect of Capital Expenditure on Local Own-Source Revenue: Study In East Java Indonesia*. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Vol. 10 No. 2 ▪ Agustus 2017
- Tuasikal, A., 2008. *Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi 1 (2): 142-155. Available at: <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/index.php/TRA/article/viewFile/299/284>.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1999 tentang Dana Perimbangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah..
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang PemerintaVhan Daerah

IAIN JEMBER

## LAMPIRAN

### Tabel Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standart Deviasi
Belanja Modal	3579652664	25178916582 46	36561878761 8,2	342150820858, 6
PAD	3430477932 3	51618445711 72	41089405688 4,1	678694220043, 5
DAU	3789161090 00	17164722140 00	94991214933 9.5	302346427856

### Tabel Hasil Uji Normalitas

	Nilai	Syarat	Keterangan
Jarque-Bera	1,671	Nilai JB dibawah 2	Terdistribusi normal
Probabilitas	0,676	lebih besar dari 0,005	Terdistribusi normal

### Tabel Hasil Uji Multikolinieritas

	PAD	DAU	Rasio Dereajat Desentralisasi	Rasio Kemandirian Keuangan	Rasio Efektivitas PAD	Rasio Efisiensi Keuangan	Rasio SiLPA
PAD	1.00	0.50	0.74	0.74	0.26	0.32	-0.06
DAU	0.50	1.00	-0.05	0.07	-0.06	-0.08	-0.16

### Tabel Hasil Uji Heterokedastisitas

	<b>t-statistik</b>	<b>Probabilitas</b>
PAD	-1.083844	0.3893
DAU	1.237594	0.2179

**Tabel Hasil Uji Autokorelasi**

<b>Nilai Durbin Watson</b>	<b>Nilai Du</b>	<b>Ketentuan</b>	<b>Hasil</b>
2,007	Nilai dU = 1,820 Nilai (4-dU) = 2,172	terletak antara dU dan (4-dU)	Tidak ada autokorelasi

**Tabel Hasil Uji Pemilihan Model Data Panel**

<b>Metode</b>	<b>Probabilitas</b>	<b>Hasil Model Terbaik</b>
Uji Chow	0,000	<i>Fixed Effect Model (FEM)</i>
Uji Hausman	0,000	<i>Fixed Effect Model (FEM)</i>
Uji Lagrange Multiplier	0,104	<i>Pooled Least Square (PLS)</i>

**Tabel Hasil Analisis Fixed Effect Model (FEM)**

<b>Variabel</b>	<b>Koefisien</b>	<b>Std. Error</b>	<b>Probabilitas</b>
Konstanta	34,00	29,547	0,251
PAD	1,815	0,227	0,000*
DAU	-2,051	1,119	0,068***

**Tabel Hasil Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

<b>Model</b>	<b>R-Square</b>	<b>Adjusted R Square</b>	<b>Std. Error of regression</b>
--------------	-----------------	--------------------------	---------------------------------

<i>Fixed Effect Model (FEM)</i>	0,937	0,917	0,379
---------------------------------	-------	-------	-------

**Tabel Hasil uji t-statistik**

<b>Variabel</b>	<b>Std. Error</b>	<b>t-statistik</b>	<b>Probabilitas</b>
Konstanta	29,547	1,150	0,251
PAD	0,227	7,975	0,000*
DAU	1,119	-1,833	0,068***

**Tabel Hasil Uji F-Statistik**

<b>Model</b>	<b>Sum Square</b>	<b>F-Statistik</b>	<b>Prob. (F-statistik)</b>
<i>Fixed Effect Model (FEM)</i>	20,812	48,225	0,000



## Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Pendapatan Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Jawa Timur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PAD (Pendapatan alokasi daerah)</li> <li>2. DAU (Dana alokasi umum)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otonomi Daerah</li> <li>2. PAD</li> <li>3. DAU</li> <li>4. Belanja Modal</li> </ol>	<p>Website  <a href="http://www.djpk.kemenkue.go.id/">http://www.djpk.kemenkue.go.id/</a>.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode Penelitian Menggunakan Metode Penelitian Kuantitatif.</li> <li>2. Obyek Penelitian Menggunakan Data Panel.</li> <li>3. Teknik Pengumpulan Data Menggunakan Data Sekunder.</li> <li>4. Analisis Data</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah PAD Berpengaruh Signifikan Pada Alokasi Belanja Modal Pada Struktur APBD di Jawa Timur?</li> <li>2. Apakah DAU Berpengaruh Signifikan Pada Alokasi Belanja Modal Pada Struktur APBD di Jawa Timur?</li> </ol>

IAIN JEMBER









### Jurnal Kegiatan Penelitian

No	Tanggal	Uraian kegiatan	Ttd
1	1 Mei 2020	Menyerahkan surat izin penelitian kepada kepala laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.	
2	11 Mei 2020	Mengambil data sekunder dari djpk.kemenkeu.id, 2020	
3	2 Juni 2020	Mengolah data Yang diperoleh dari Kementerian Keuangan	
4	10 Maret 2021	Meminta surat selesai penelitian kepada kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Jember.	

Jember, 21 Juni 2021  
An. Dekan  
Kaprosdi Ekonomi Syariah

  
**Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I**  
**NIP. 198209222009012005**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hikmah Dewi Budiana  
NIM : E20162060  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**analisis pengaruh kinerja keuangan dan pendapatan terhadap alokasi belanja modal di provinsi jawa timur**” adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Jember, 04 Juli 2021

Saya yang menyatakan



**Hikmah Dewi Budiana**

**NIM.E20162060**

## BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Hikmah Dewi Budiana  
Tempat Tanggal Lahir : Bondowoso, 02 November 1997  
Alamat : Jl. Pakisan Dusun Bunduh Desa Bataan Rt 09 Rw 03  
Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso  
No Hp : 089680379983  
Email : hikmahdewi159@gmail.com  
Nim : E20162060  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

### RIWAYAT PENDIDIKAN

2002-2004 : TK AL-HIDAYAH  
2004-2010 : SD NEGERI KADEMANGAN 01  
2010-2013 : SMP NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO  
2013-2016 : MAN BONDOWOSO  
2016-2021 : UIN KHAS JEMBER

### PENGALAMAN ORGANISASI

1. OSIS SMP NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO
2. BENDAHARA OSIM NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO
3. OSIS MAN BONDOWOSO
4. IKATAN KELUARGA MAHASISWA PERGERAKAN BONDOWOSO  
(IKMPB) IAIN JEMBER